

LAPORAN PRAKTIKUM KOMUNITAS

**PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN RAWAN SOSIAL
EKONOMI MELALUI PELATIHAN BUDIDAYA SAYURAN
DI DESA SITUSARI KECAMATAN DARMA
KABUPATEN KUNINGAN**

Oleh:
Muhammad Bintang Pratama
NRP. 2204056



**PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2025**

LAPORAN PRAKTIKUM KOMUNITAS TAHUN 2025
PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN RAWAN SOSIAL
EKONOMI MELALUI PELATIHAN BUDIDAYA SAYURAN
DI DESA SITUSARI KECAMATAN DARMA
KABUPATEN KUNINGAN

Oleh:

Muhammad Bintang Pratama
NRP. 2204056

Telah disetujui pada tanggal : 30 Desember 2025

Oleh :

Pembimbing Utama



Drs. Ramli, M.Pd.,

Pembimbing Pendamping



Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos.,

Mengetahui :

Ketua Program Studi Pekerjaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial



Dr. Denti Kardeti, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur praktikan panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya praktikan dapat menyelesaikan kegiatan Praktikum Komunitas yang dilaksanakan di Desa Sitisari, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan setiap orang yang mengikuti petunjuk dan ajarannya hingga akhir zaman.

Praktikan sendiri menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi, hasil laporan ini adalah upaya maksimal praktikan dalam mengerjakan laporan praktikum. Oleh karena itu, praktikan mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan laporan praktikum komunitas ini.

Praktikan pribadi mengharapkan agar laporan individu ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pekerjaan sosial. Selama melaksanakan kegiatan praktikum sampai dengan penulisan laporan praktikum komunitas ini banyak tantangan yang praktikan hadapi, namun pada akhirnya praktikan mampu melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun secara spiritual. Oleh karena itu, praktikan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Suharma, S.Sos., MP., Ph.D., selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
2. Dr. Denti Kardeti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang telah memberikan arahan dalam kegiatan Praktikum Komunitas
3. Dr. Rahmat Syarif Hidayat, MPS.Sp., selaku kepala laboratorium Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
4. Drs. Ramli, M.Pd., dan Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos., selaku dosen pembimbing atau supervisor Praktikum Komunitas yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan kepada praktikan dari awal sampai akhir kegiatan Praktikum Komunitas
5. Kepala Desa Sitisari, Kecamatan Darma Bapak Endin beserta seluruh staf dan aparat Desa yang telah membantu kegiatan Praktikum Komunitas

6. Edison, P.Pd., selaku Pendamping Lapangan Praktikan di Desa Situsari yang telah membantu dan memberikan arahan dan bimbingan bagi praktikan selama berkegiatan di Desa Situsari
7. Cicih, Nisa, Eem selaku Tim Kerja Masyarakat yang telah membantu praktikan selama melaksanakan kegiatan Program atau Intervensi di Desa Situsari
8. Rekan-rekan kelompok 2 Praktikum Komunitas yang dari awal hingga akhir selalu memberikan dukungan dan kerja samanya
9. Orang tua, keluarga, serta teman-teman yang senantiasa memberikan semangat, doa, serta dukungan baik moril maupun materil.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu praktikan dalam kegiatan Praktikum dari awal hingga penyusunan laporan Praktikum Komunitas ini. Praktikan mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan laporan Praktikum Komunitas ini, sehingga akhirnya laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi bidang pekerjaan sosial.

Bandung, 5 Desember 2025

Muhammad Bintang Pratama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR FOTO	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Praktikum Komunitas	1
1.2. Tujuan dan manfaat Praktikum Komunitas.....	2
1.2.1. Tujuan Praktikum Komunitas.....	2
1.2.2. Manfaat Praktikum Komunitas.....	2
1.3. Sasaran	3
1.4. Sistematika Penulisan Laporan.....	4
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL PRAKTIKUM KOMUNITAS	6
2.1. Metode Pekerjaan Sosial	6
2.1.1. Pekerjaan Sosial dengan Komunitas (Community Work)	6
2.1.2. Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (<i>Group Work</i>)	14
2.2. Tahapan dalam Proses Pekerjaan Sosial.....	17
2.2.1. Membangun Relasi (Dialog).....	17
2.2.2. Asesmen (<i>Discovery</i>)	19
2.2.3. Rencana Intervensi (<i>Discovery</i>)	19
2.2.4. Intervensi (<i>Development</i>)	21
2.2.5. Evaluasi (<i>Development</i>)	21
2.2.6. Terminasi dan Rujukan (<i>Continuity</i>)	22
2.3. Peranan Pekerja Sosial dalam <i>Community Work</i> dan <i>Group Work</i>	22
2.4. Tinjauan konseptual yang terkait dengan kasus yang ditangani	24
2.4.1 Tinjauan Komunitas	24
2.4.1.1 Pengertian Komunitas	24
2.4.2 Tinjauan Pemberdayaan	27
2.4.3. Tinjauan tentang Penyuluhan Sosial	30
2.4.4. Tinjauan tentang Peningkatan Kapasitas	32
2.4.6. Tinjauan tentang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	37
2.5. Regulasi yang mendukung penanganan kasus	41

BAB III KONTEKS PRAKTIKUM KOMUNITAS	44
3.1. Gambaran Umum Komunitas Lokasi Praktikum	44
3.1.1. Sejarah Desa	44
3.1.2. Kondisi Geografis	45
3.1.3. Kondisi Demografis	45
3.1.4. Kondisi Pendidikan	46
3.1.5. Kondisi Ekonomi	47
3.1.6. Kondisi Sosial, Budaya, dan Spritual	48
3.1.7. Visi dan Misi	49
3.1.8. Struktur Pemerintah Desa Sitisari	50
3.2. Program/Layanan yang diberikan Komunitas	53
3.2.1. Program/ Layanan Administrasi Kependudukan	53
3.2.2. Program/Layanan Kesejahteraan	54
3.2.3. Program/Layanan Kesehatan	54
3.2.4. Program/Layanan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban	55
3.3. Profil Penerima Manfaat Program/Layanan Komunitas	55
BAB IV PELAKSANAAN INTERVENSI KOMUNITAS	57
4.1. Tahap Membangun Relasi (Dialog)	57
4.1.1. Proses Membangun Relasi	57
4.1.2. Hasil Membangun Relasi	61
4.2. Tahap Asesmen (<i>Discovery</i>)	62
4.2.1. Proses Asesmen Awal	63
4.2.2. Hasil Asesmen Awal	65
4.2.3. Proses Asesmen Lanjutan	69
4.2.4. Hasil Asesmen Lanjutan	71
4.3. Tahap Rencana Intervensi (<i>Discovery</i>)	73
4.3.1. Proses Rencana Intervensi	73
4.3.2. Hasil Rencana Intervensi	75
4.4. Tahap Intervensi (<i>Development</i>)	78
4.4.1 Bentuk Kegiatan Intervensi	78
4.5. Tahap Evaluasi (<i>Development</i>)	84
4.5.1. Evaluasi Proses	85
4.5.2. Evaluasi Hasil	87
4.6. Tahap Terminasi dan Rujukan (<i>Continuity</i>)	88
4.6.1. Terminasi	88
4.6.2. Rujukan	89

BAB V PRAKTIK BAIK PRAKTIKUM KOMUNITAS	90
5.1. Integrasi/Keterkaitan/ Saling Melengkapi Metode Community Work dan Group Work serta Capaian terbaik dari Praktikum Komunitas.	90
5.2. Refleksi Praktikan	91
5.2.1. Pengalaman Praktikum untuk pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerja Sosial	91
5.2.2. Dilema Etik yang Dihadapi dan solusinya	91
5.3. Keterlibatan (Peran) Praktikan dalam Kegiatan di Lokasi Praktikum Komunitas.....	92
5.4. Tantangan Praktikum Komunitas.	96
BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI	97
6.1. Simpulan (Temuan-temuan penting selama praktikum)	97
6.2. Rekomendasi (untuk pengembangan dan pemberdayaan organisasi dan masyarakat, implementasi kebijakan dan penyuluhan sosial).....	97
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR LAMPIRAN	102

DAFTAR FOTO

Foto 4.1. Perkenalan dengan kepala Desa Situsari.....	58
Foto 4.2. Perkenalan dengan <i>stakeholder</i> Desa Situsari	59
Foto 4.3. Pelaksanaan Asesmen Awal	65
Foto 4.4. Wawancara dengan ketua RT 01	69
Foto 4.5. Home Visit ke rumah PRSE	70
Foto 4.6. Pelaksanaan Proses Rencana Intervensi	74
Foto 4.7. Pelaksanaan Teknik <i>Technology of Participation (ToP)</i>	78
Foto 4.8. Pelaksanaan Penyuluhan.....	80
Foto 4.9. Pelatihan Budidaya Sayuran	82
Foto 4.10. Praktik menanam sayuran.....	83
Foto 5.1. Pengajian	92
Foto 5.2. Senam bersama kader PKK.....	93
Foto 5.3. Posyandu	93
Foto 5.4. Pelantikan Perangkat Desa	94
Foto 5.5. Senam bersama di kecamatan.....	94
Foto 5.6. Family Gathering.....	95
Foto 5.7. Pembuatan pupuk	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. <i>Social Mapping</i> Desa Situsari.....	68
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Struktur organisasi Desa Situsari	51
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kondisi Geografis Desa Situsari	45
Tabel 3.2. Sarana Pendidikan Desa Situsari	46
Tabel 3.3. Tingkat pendidikan Desa Situsari	47
Tabel 3.4. Jenis pekerjaan masyarakat Desa Situsari	48
Tabel 4.1. Hasil Pelaksanaan teknik Methodology Participatory Assessment (MPA)	66
Tabel 4.2. Hasil pelaksanaan Sustainable Livelihood Asset (SLA)	68
Tabel 4.3. Data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di RT 01	72
Tabel 4.4. Hasil Pelaksanaan Rencana Intervensi	76
Tabel 4.5. Evaluasi Proses.....	85
Tabel 4.6. Faktor Pendukung dan Penghambat kegiatan Intervensi.....	87
Tabel 4.7. Evaluasi Program Intervensi.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita acara Lokakarya 1	102
Lampiran 2 Berita acara lokakarya 2	103
Lampiran 3 Rencana Belajar	104
Lampiran 4 Absensi minggu pertama	105
Lampiran 5 Absensi minggu kedua	105
Lampiran 6 Absensi minggu ketiga.....	106
Lampiran 7 Absensi minggu keempat	106
Lampiran 8 Absensi minggu kelima.....	107
Lampiran 9 Absensi minggu keenam	107
Lampiran 10 Absensi minggu ketujuh.....	108
Lampiran 11 SK SARIMBA	108

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktikum Komunitas

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung menyelenggarakan Praktikum Komunitas sebagai bagian integral dari kontinum praktik keilmuan mahasiswa, yang dimulai dari Praktikum Laboratorium, berlanjut ke Praktikum Institusi, dan diakhiri dengan Praktikum Komunitas. Praktikum ini dirancang untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam penerapan nilai-nilai profesi pekerjaan sosial, pengetahuan teoritis, serta keterampilan praktis pada seting makro terutama dalam praktik pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan sosial. Melalui rangkaian praktik yang berkelanjutan, mahasiswa diharapkan mampu memperlihatkan perkembangan kompetensi yang jelas dari tahap pembelajaran awal hingga penerapan lapangan yang mandiri dan bertanggung jawab.

Tujuan utama Praktikum Komunitas adalah memastikan mahasiswa menguasai dan menerapkan kompetensi pekerjaan sosial aras makro dalam seluruh tahapan pertolongan sosial: membangun relasi (dialog), melakukan asesmen dan menyusun rencana intervensi (*discovery*), melaksanakan intervensi serta mengevaluasi hasilnya (*development*), serta melakukan terminasi dan rujukan (*continuity*). Pendekatan pembelajaran yang digunakan menekankan eksplorasi, ekplanasi (penjelasan konseptual), dan implementasi praktis sehingga mahasiswa tidak hanya memahami kerangka teoretis tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata di komunitas, baik secara kelompok maupun mandiri

Praktikum Komunitas memadukan pembelajaran di kelas, pembekalan intensif pra-lapangan, supervisi pra dan di lapangan, serta refleksi pascalapangan. Kegiatan lapangan dilaksanakan dalam konteks organisasi sosial dan masyarakat lokal dengan fokus pada penanganan isu-isu prioritas kesejahteraan sosial, antara lain: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterasingan, dan kebencanaan yang secara ringkas dikenal sebagai 12 PAS (Pemerlu ATENSI Sosial). Pelaksanaan intervensi diarahkan untuk menghasilkan dampak yang dapat diukur pada tingkat komunitas dan untuk memperkuat jaringan rujukan yang melibatkan pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, dan lembaga terkait di tingkat kabupaten

1.2. Tujuan dan manfaat Praktikum Komunitas

1.2.1. Tujuan Praktikum Komunitas

Tujuan Praktikum Komunitas disusun untuk memastikan bahwa mahasiswa mampu menerjemahkan teori pekerjaan sosial ke dalam praktik pemberdayaan dan intervensi di tingkat komunitas. Tujuan dirinci dalam tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan umum

Mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan kompetensi pekerjaan sosial pada aras makro, khususnya dalam praktik *community work*, melalui seluruh tahapan pertolongan pekerjaan sosial, yakni membangun relasi (*dialog*), melakukan asesmen dan menyusun rencana intervensi (*discovery*), melaksanakan intervensi dan melakukan evaluasi (*development*), serta melakukan terminasi dan rujukan (*continuity*) dengan memegang teguh etika profesi dan kebijakan institusi.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus Praktikum Komunitas adalah mahasiswa mampu:

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip dasar, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam seluruh pelaksanaan praktikum.
- 2) Memahami dan menerapkan tahapan pertolongan pekerjaan sosial generalis.
- 3) Mengidentifikasi dan menerapkan teori, pendekatan, metode, teknik, strategi, dan model intervensi yang relevan dalam praktik pekerjaan sosial aras makro.
- 4) Memahami konteks praktikum dan karakteristik sasaran praktikum di komunitas.
- 5) Mempraktikkan nilai, pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial pada aras makro, khususnya pada tahap membangun relasi (*dialog*), asesmen dan penyusunan rencana intervensi (*discovery*), intervensi, dan evaluasi (*development*), sampai dengan terminasi dan rujukan (*continuity*) melalui penanganan masalah dan pengembangan potensi dan sumber komunitas.

1.2.2. Manfaat Praktikum Komunitas

1. Manfaat Bagi Mahasiswa

Melalui Praktikum Komunitas, mahasiswa memperoleh pengalaman pembelajaran terapan yang mencakup:

- 1) Penerapan prinsip-prinsip dasar, nilai, dan etika pekerjaan sosial secara konsisten selama pelaksanaan Praktikum Komunitas.

- 2) Pemahaman dan penerapan tahapan pertolongan pekerjaan sosial pada tingkat komunitas.
- 3) Identifikasi dan pemahaman berbagai teori, pendekatan, metode, teknik, strategi, dan model yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial pada aras makro, serta pemahaman terhadap regulasi yang relevan.
- 4) Pemahaman terhadap teks dan konteks praktikum serta karakteristik sasaran praktikum di komunitas.
- 5) Penerapan nilai, pengetahuan, dan keterampilan pekerjaan sosial pada aras makro, khususnya pada tahap membangun relasi (dialog), asesmen dan penyusunan rencana intervensi (discovery), pelaksanaan intervensi dan evaluasi (development), hingga terminasi dan mekanisme rujukan (continuity).
- 6) Penyelesaian penanganan masalah atau pengembangan potensi/sumber daya komunitas di lokasi praktikum melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan sosial.

2. Manfaat bagi komunitas lokasi praktikum

Komunitas memperoleh dukungan dan pendampingan dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan, mengembangkan potensi dan sumber daya, serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan sosial. Selain itu, komunitas dapat mendokumentasikan dan mempublikasikan praktik baik yang dilaksanakan oleh mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

3. Manfaat bagi Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung

Praktikum Komunitas menjadi wahana untuk menerapkan dan menguji efektivitas kompetensi yang telah diajarkan di kelas kepada mahasiswa. mahasiswa untuk terlibat langsung dalam berbagai program komunitas serta menyediakan kesempatan bagi dosen pembimbing untuk melaksanakan supervisi pekerjaan sosial.

1.3. Sasaran

Adapun sasaran dalam kegiatan Praktikum Komunitas ini adalah agar praktikan mampu menerapkan keterampilan pekerjaan sosial pada aras makro, khususnya dalam tiga tahapan utama yaitu dialog, discovery, dan development. Praktikum ini dilaksanakan di desa yang telah ditetapkan, yaitu Desa Sitisari, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan.

Sasaran perubahan dalam praktikum komunitas ini mencakup beberapa pihak:

1. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Desa Sitisari menjadi sasaran utama perubahan karena terlibat langsung sebagai penerima manfaat dari seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan dalam praktikum komunitas.
2. Masyarakat dan perangkat Desa Sitisari menjadi sasaran pendukung yang berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif serta mendukung keberlanjutan program pemberdayaan PRSE.
3. Lembaga dan kelompok mitra terkait dijadikan sasaran strategis untuk membangun kerja sama dan jejaring, guna memperkuat pelaksanaan serta pengembangan program pemberdayaan PRSE di Desa Sitisari.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan

BAB I	PENDAHULUAN memuat tentang latar belakang praktikum Komunitas; tujuan dan manfaat praktikum komunitas; sasaran; dan sistematika penulisan laporan
BAB II	LANDASAN KONSEPTUAL PRAKTIKUM KOMUNITAS. Memuat tentang metode pekerjaan sosial komunitas, tahapan dalam proses pekerjaan sosial dengan komunitas, peranan pekerjaan sosial Community Work dan group work, tinjauan konseptual yang terkait dengan kasus yang ditangani, dan regulasi yang mendukung penanganan kasus.
BAB III	KONTEKS PRAKTIKUM KOMUNITAS Memuat tentang gambaran umum Komunitas lokasi praktikum, program/layanan yang diberikan Komunitas, dan profil tempat komunitas.
BAB IV	PELAKSANAAN INTERVENSI KOMUNITAS Memuat tentang tahap Dialog, Asesmen Awal, Asesmen Lanjutan, Rencana Intervensi, Intervensi, Terminasi
BAB V	PRAKTIK BAIK PRAKTIKUM KOMUNITAS Integrasi/Keterkaitan/ Saling Melengkapi Metode Community Work dan Group Work serta Capaian terbaik dari Praktikum

Komunitas. Refleksi Praktikan (Pengalaman Praktikum untuk pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerja Sosial, Dilema Etik yang Dihadapi an Solusinya). Keterlibatan (Peran) Praktikan dalam Kegiatan di Lokasi Praktikum Komunitas. Tantangan Praktikum Komunitas

BAB VI

SIMPULAN DAN REKOMENDASI Memuat tentang simpulan (temuan-temuan penting selama praktikum) dan rekomendasi (untuk pengembangan dan pemberdayaan organisasi dan masyarakat, implementasi kebijakan dan penyuluhan sosial)

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL PRAKTIKUM KOMUNITAS

2.1. Metode Pekerjaan Sosial

2.1.1. Pekerjaan Sosial dengan Komunitas (Community Work)

2.1.1.1. Pengertian Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Menurut Dubois & Miley (2014) level intervensi makro dalam pekerjaan sosial meliputi lingkungan, komunitas dan masyarakat untuk mencapai perubahan sosial. Netting (2017) mengatakan bahwa pekerjaan sosial komunitas merupakan bentuk dari praktik yang dikemas sebagai bentuk intervensi profesional yang diarahkan untuk membawa perubahan terencana (*planned change*) dalam organisasi dan komunitas. Praktik pekerjaan sosial ini didasari oleh berbagai model dan pendekatan, serta beroperasi sejalan dengan pengetahuan, nilai nilai dan keterampilan pekerjaan sosial. Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pelayanan kemanusiaan bersifat profesional yang ditujukan untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat guna meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan bagi mereka mencapai tujuan.

2.1.1.2. Tujuan Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Pratik pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat lokal (*locality development*) merupakan kegiatan praktik Pekerjaan Sosial berbasis Komunitas. Menurut Lorraine M. Gutiérrrez and Larry M. Gant (2016:2) menyatakan bahwa: Tujuan praktik pekerjaan Sosial berbasis Komunitas adalah untuk mengembangkan potensi dan sumber yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas guna menangani permasalahan sosial yang dihadapinya.”

Praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas bertujuan sebagai pengembangan, pencegahan atau penanganan permasalahan sosial yang memfokuskan pada pendekatan ekologi dalam upaya untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan berkembangnya inisiatif masyarakat untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungannya
2. Meningkatkan kesadaran dan berkembangnya inisiatif masyarakat untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat

3. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungannya.
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan serta mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan sumber yang ada.
5. Memperoleh masukan tentang peluang-peluang pemanfaatan sistem sumber penyedia pelayanan yang dapat diakses untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
6. Memperoleh masukan tentang peluang-peluang pengembangan kebijakan di tingkat lokal

2.1.1.3. Model Pendekatan Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Dalam konteks makro, banyak model yang dapat digunakan untuk intervensi dengan masyarakat. Suharto (2014) menjelaskan 3 model pengembangan masyarakat yaitu pengembangan masyarakat local (*locality development*), perencanaan sosial (*social planning*), dan aksi sosial (*social action*):

1. Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality Development*)

Pengembangan masyarakat lokal merupakan proses yang mendorong kemajuan sosial dan ekonomi melalui keterlibatan aktif masyarakat itu sendiri. Dalam pendekatan ini, warga menjadi pihak utama yang mengidentifikasi masalah serta merumuskan solusi berdasarkan potensi lokal yang mereka miliki. *Locality Development* memiliki ciri-ciri seperti kebersamaan, identitas kelompok, keberagaman, dan kemandirian. Model ini menekankan bahwa masyarakat mampu menyelesaikan persoalan mereka secara mandiri ketika diberi ruang untuk berpartisipasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tujuannya lebih berorientasi pada proses (*process goal*), yaitu memperkuat kapasitas masyarakat dan meningkatkan kemampuan sistem sosial yang sudah ada. Melalui pendekatan ini, pengembangan masyarakat mengutamakan pemecahan masalah dengan mengoptimalkan kekuatan yang terdapat dalam komunitas.

2. Perencanaan Sosial (*Social Planning*)

Perencanaan sosial adalah proses penetapan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang bersifat pragmatis untuk menyelesaikan suatu masalah sosial dan mencegah agar masalah tersebut tidak muncul kembali. Pendekatan ini lebih terfokus pada pencapaian tujuan tugas (*task goal*). Model ini biasanya

diterapkan pada kelompok masyarakat yang rentan atau kurang beruntung, seperti kelompok miskin atau PRSE. Dalam konteks ini, pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang menyusun program berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat. Kelompok sasaran dipandang sebagai penerima layanan (*beneficiaries*), sehingga perencanaan yang dibuat harus mampu menjawab persoalan sosial secara terukur dan efektif.

3. Aksi Sosial (*Social Action*)

Aksi sosial muncul ketika terdapat ketimpangan atau ketidakadilan yang dialami sebagian masyarakat akibat dominasi pihak tertentu. Tujuan utama dari aksi sosial adalah menciptakan perubahan mendasar pada struktur sosial, terutama yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan proses pengambilan keputusan. Model ini berpijak pada anggapan bahwa masyarakat sering kali menjadi korban ketidakadilan struktural. Karena itu, aksi sosial dilakukan melalui proses penyadaran, pengorganisasian, dan pemberdayaan masyarakat agar mampu memperjuangkan hak-hak mereka. Pendekatan ini mendorong terwujudnya prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, dengan cara menuntut perubahan sistemik yang lebih pro-masyarakat.

2.1.1.4. Strategi Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Dalam proses intervensi komunitas, pekerja sosial dapat menggunakan beragam strategi dan taktik yang disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Netting (2017) membagi strategi tersebut ke dalam tiga kategori utama, yaitu kolaborasi (*collaboration*), kampanye sosial (*social campaign*), dan kontes (*contest*). Masing-masing strategi memiliki pendekatan tersendiri yang bisa dipilih sesuai kebutuhan.

1. Kerja Sama (*Collaboration*)

Kolaborasi digunakan ketika komunitas sasaran sudah memahami apa yang perlu dilakukan dan memiliki kemauan bersama untuk menjalankan rencana kegiatan. Artinya, masyarakat berada dalam posisi siap dan telah menyepakati tujuan perubahan. Dalam strategi ini, terdapat dua taktik utama. Pertama, implementasi, yaitu menjalankan rencana yang sudah disiapkan melalui kerja sama yang solid antara pekerja sosial dan warga. Karena masyarakat sudah memiliki kesadaran dan dukungan yang sama, langkah perubahan tinggal dilaksanakan. Taktik kedua adalah *capacity building* atau penguatan kapasitas,

yang bertujuan meningkatkan kemampuan komunitas. Di dalamnya terdapat dua bentuk pendekatan, yaitu memperluas partisipasi anggota masyarakat dan memberdayakan kelompok-kelompok yang selama ini kurang berperan atau berada dalam posisi lemah.

2. Kampanye Sosial (*Social Campaign*)

Kampanye sosial digunakan ketika pekerja sosial perlu mendorong kelompok sasaran untuk menyadari pentingnya perubahan. Tujuan utama strategi ini adalah mempengaruhi persepsi dan membuka ruang agar sumber daya yang diperlukan dapat dialokasikan. Beberapa taktik yang digunakan dalam kampanye sosial antara lain pendidikan atau penyuluhan, persuasi, dan pemanfaatan media massa. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas agar warga mau menerima rencana program dan bersedia terlibat aktif. Persuasi digunakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan yang dirancang benar-benar menguntungkan bagi mereka. Sementara itu, pemanfaatan media massa bertujuan memperluas jangkauan informasi serta mengubah cara pandang masyarakat melalui media yang mudah mereka akses.

3. Kontes (*Contest*)

Strategi kontes digunakan ketika masalah yang dialami komunitas berasal dari struktur kekuasaan yang tidak adil, menindas, atau merugikan sebagian besar warga. Dalam situasi tersebut, perubahan tidak hanya membutuhkan kerja sama internal, tetapi juga dorongan terhadap pihak-pihak yang memiliki kuasa. Taktik yang dipakai dalam strategi ini mencakup advokasi serta tawar-menawar dan negosiasi. Advokasi dilakukan oleh pekerja sosial untuk memperjuangkan kepentingan kelompok sasaran, misalnya dengan mengajukan tuntutan atau syarat tertentu kepada pihak berwenang seperti kelompok dominan, pemerintah daerah, atau lembaga yang menyebabkan ketidakadilan. Melalui proses negosiasi, pekerja sosial berupaya mencari kesepakatan yang dapat mengurangi kerugian yang dialami masyarakat dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak.

2.1.1.5. Teknik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas atau Pekerja sosial makro dalam melakukan praktiknya menggunakan teknik-teknik yang dapat diterapkan menurut Firsan (2011), yaitu:

4. *Community Involvement* (CI)

Community Involvement merupakan teknik di mana praktikan berbaur langsung dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan, baik yang bersifat formal maupun informal. Keterlibatan ini dilakukan pada tingkat individu maupun kelompok, dengan tujuan menciptakan suasana yang terbuka sehingga masyarakat merasa nyaman memberikan informasi yang dibutuhkan. Pendekatan ini juga membantu mencegah adanya tekanan dari pihak tertentu. CI biasanya menjadi langkah awal bagi praktikan untuk membangun kepercayaan serta memahami dinamika kehidupan masyarakat desa melalui keterlibatan aktif

5. Kunjungan Rumah atau *Home Visit*

Home visit adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendatangi rumah warga atau pihak terkait secara langsung. Melalui kunjungan ini, praktikan dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi yang dialami masyarakat, membantu mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi, serta melengkapi data yang telah diperoleh melalui metode lain. Home visit menjadi salah satu cara untuk melihat situasi keluarga secara lebih komprehensif.

6. Pertemuan Warga atau *Community Meeting*

Community Meeting merupakan forum musyawarah yang melibatkan warga desa untuk membahas berbagai persoalan yang ada di lingkungan mereka. Dalam forum ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi, mengungkapkan masalah yang dihadapi, serta mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung rencana perubahan. Teknik ini sangat penting untuk membangun partisipasi dan pengambilan keputusan secara kolektif.

7. Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

PRA adalah pendekatan yang mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengkaji kondisi desa secara partisipatif. Pendekatan ini menempatkan warga sebagai pihak yang paling memahami situasi lingkungannya. PRA digunakan untuk menggali informasi, memahami keadaan sosial masyarakat, dan mengidentifikasi kondisi desa secara lebih menyeluruh. PRA memiliki beberapa teknik berdasarkan Acuan *Participatory Rural Appraisal* sebagai berikut:

- 1) *Direct Observation* (Observasi Langsung). *Direct Observation* adalah kegiatan observasi langsung pada obyekobyek tertentu, kejadian, proses, hubungan-hubungan masyarakat dan mencatatnya. Setelah melakukan MPA untuk asesmen awal, praktikan mengobservasi secara langsung menuju PPKS tersebut untuk melakukan cross check.

- 2) Pemetaan Sosial. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti tata letak permukiman, mata pencaharian, jalur transportasi, sarana umum, serta persebaran kelompok rentan. Hasil pemetaan memberikan gambaran umum mengenai wilayah dan kehidupan sosial masyarakat.
- 3) *Semi-Structured Interviewing (SSI)*. Wawancara semi terstruktur menggunakan panduan pertanyaan yang bersifat fleksibel sehingga dapat berkembang sesuai situasi. Wawancara dilakukan kepada tokoh atau kelompok yang dianggap mewakili informasi, seperti perempuan, pemuda, petani, dan aparat desa.
- 4) *Transect Walk (Penelusuran)*. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri wilayah desa sambil mengamati kondisi lingkungan fisik, aktivitas masyarakat, dan pola pemanfaatan ruang.
- 5) Diagram Venn. Teknik ini adalah untuk mengetahui hubungan institusional dengan masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh masing-masing institusi dalam kehidupan masyarakat serta untuk mengetahui harapan-harapan apa dari masyarakat terhadap institusi-institusi tersebut.

8. *Methodology Participatory Assessment (MPA)*

MPA merupakan teknik yang memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi kondisi sosial, masalah yang mereka hadapi, faktor penyebabnya, serta potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah tersebut. Teknik ini efektif untuk mengajak masyarakat yang biasanya kurang berani menyampaikan pendapat agar ikut terlibat dalam proses diskusi.

9. *Technology of Participation (ToP)*

Technology of Participation adalah teknik perencanaan berbasis partisipasi yang memberikan ruang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk menyampaikan ide dan menghargai gagasan orang lain. ToP terdiri atas tiga metode utama:

- 1) Metode Diskusi (ORID), yaitu pendekatan objektif, reflektif, interpretatif, dan decisional untuk membantu proses dialog kelompok.
- 2) Metode *Workshop*, digunakan untuk menentukan langkah-langkah intervensi berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.
- 3) *Action Planning*, yaitu penyusunan rencana tindakan secara lebih rinci mengenai apa yang akan dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah.

10. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD adalah teknik diskusi kelompok yang melibatkan peserta atau narasumber yang relevan dengan topik yang dibahas. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai fasilitator. FGD efektif digunakan untuk membahas isu-isu yang kompleks dan membutuhkan pandangan dari ahli maupun berbagai kelompok masyarakat.

11. Evaluasi Partisipatif

Evaluasi partisipatif merupakan teknik evaluasi yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk menilai keberhasilan program atau kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, kuesioner, maupun media digital seperti *Google Form*. Tujuan utama teknik ini adalah memastikan pendapat masyarakat terakomodasi, memberikan masukan yang realistis, serta mendukung keberlanjutan program sesuai kebutuhan mereka.

12. Pohon Harapan

Pohon harapan adalah teknik yang digunakan untuk menggali aspirasi dan harapan masyarakat terkait permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat menuliskan harapan mereka pada kertas berbentuk daun, kemudian ditempelkan pada batang pohon sebagai simbol aspirasi kolektif. Kumpulan harapan ini selanjutnya menjadi dasar untuk merancang program atau intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.1.6. Pengetahuan dan Keterampilan Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Pengetahuan dalam *Community Work* menurut Jim Ife dalam (Affriansyah, 2023) terdapat 6 pengetahuan, yaitu:

1. Metode dan Pendekatan dalam pekerja sosial masyarakat,
2. Pengetahuan tentang komunitas, organisasi dan kebijakan,
3. Prinsip-prinsip dan nilai pekerja sosial masyarakat,
4. Keterampilan-keterampilan pekerja sosial masyarakat,
5. Peranan dan tugas pekerja sosial masyarakat, dan
6. Proses (tahapan) intervensi pekerja sosial masyarakat.

Pekerja sosial dalam pelaksanaan intervensi komunitas dituntut memiliki berbagai keterampilan profesional agar proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Menurut Mayo dalam

Favourita (2014), keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial dalam praktik intervensi komunitas meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Keterampilan menjalin relasi (*engagement*). Kemampuan membangun hubungan saling percaya dengan komunitas sebagai langkah awal intervensi. Relasi yang baik menjadi dasar keberhasilan dalam memahami kebutuhan dan melibatkan komunitas.
2. Keterampilan dalam melakukan penilaian (*assessment*), termasuk penilaian kebutuhan (*need assesment*). Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan, masalah, potensi, dan prioritas komunitas melalui observasi, wawancara, atau diskusi partisipatif.
3. Keterampilan melakukan riset atau investigasi. Kemampuan mengumpulkan data dan informasi yang relevan tentang komunitas, termasuk memahami latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Kemampuan mengelola interaksi kelompok, memfasilitasi diskusi, dan menjaga keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan.
4. Keterampilan melakukan dinamika kelompok. Kemampuan mengelola interaksi kelompok, memfasilitasi diskusi, dan menjaga keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan.
5. Keterampilan bernegosiasi. Kemampuan menjembatani kepentingan berbagai pihak, baik di dalam komunitas maupun dengan pihak eksternal, untuk mencapai kesepakatan yang mendukung pemberdayaan.
6. Keterampilan berkomunikasi. Kemampuan menyampaikan informasi, gagasan, dan pesan dengan cara yang jelas, efektif, dan mudah dipahami oleh komunitas.
7. Keterampilan dalam melakukan konsultasi. Kemampuan memberikan saran atau panduan yang relevan kepada komunitas, baik secara individu maupun kelompok, untuk mendukung solusi atas permasalahan mereka.
8. Keterampilan manajemen, termasuk manajemen waktu dan dana. Kemampuan merencanakan, mengatur, dan mengelola sumber daya, seperti waktu, tenaga, dan dana, agar intervensi berjalan efisien dan efektif.
9. Keterampilan mencari sumber dana, termasuk pula pembuatan permohonan bantuan. Kemampuan mengidentifikasi peluang pendanaan, membuat proposal, dan mengajukan permohonan bantuan untuk mendukung program komunitas.

10. Keterampilan dalam penulisan dan pencatatan khusus laporan. Kemampuan mendokumentasikan setiap proses, hasil, dan evaluasi intervensi secara sistematis untuk laporan kepada *stakeholder*.
11. Keterampilan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Kemampuan memantau perkembangan intervensi dan mengevaluasi efektivitasnya guna memastikan tujuan program tercapai dan memberikan manfaat maksimal bagi komunitas.

2.1.2. Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Group Work*)

2.1.2.1. Tujuan Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Groupwork*)

Menurut Albert S. Alisi (1980) dalam Sundayani (2015) tujuan yang dapat dicapai dari penggunaan metode *Groupwork* sebagai berikut:

1. Perbaikan (*Restorative*) Apabila anggota kelompok mengalami disfungsi atau gangguan sosial dan personal dalam lingkungan sosialnya, maka pengalaman kelompok dapat dijadikan untuk mengadakan perbaikan.
2. Pencegahan (*Preventif*) Apabila anggota kelompok terancam oleh kerusakan fungsi personal dan sosial, maka pengalaman kelompok dapat didayagunakan untuk mempertahankan serta meningkatkan pelaksanaan fungsi secara baik.
3. Pertumbuhan Sosial Secara Normal. Pengalaman kelompok yang dibimbing pekerja sosial mampu membantu memperlancar pertumbuhan sosial secara normal serta pelaksanaan fungsi-fungsi sosial secara lebih baik.
4. Peningkatan Kemampuan Kepribadian Pengalaman kolektif yang saling tukar menukar pengalaman dalam kelompok, maka individu akan mengembangkan keterampilan sosial, bakat, yang dicapai secara memadai melalui kehidupan individu.
5. Peningkatan tanggung jawab sosial dan partisipasi sebagai warga masyarakat Pengalaman kelompok yang terbimbing dengan baik akan mampu menciptakan pengalaman yang dapat membuat para anggota kelompok untuk menyerap nilai tanggung jawab terhadap sesama, nilai demokrasi, dan lain-lain.

2.1.2.2. Tipe tipe Kelompok

1. *Social conversation* (kelompok percakapan sosial). Bertujuan untuk menguji dan menentukan seberapa dalam suatu hubungan dapat dikembangkan diantara orang-orang yang belum saling mengenal dengan baik

2. *Recreation groups* (kelompok-kelompok rekreasi), tujuan kelompok ini adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan kesenangan. Kegiatan-kegiatannya sering bersifat spontan, tidak harus ada pemimpin, tempat dan peralatan tidak perlu banyak, akomodasi bersifat paraktis,
3. *Recreation skill groups* (kelompok-kelompok rekreasi keterampilan), tujuan kelompok ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan memberikan kesenangan. Kelompok ini memerlukan penasehat, pelatih dan instruktur, serta lebih berorientasi pada aturan permanen,
4. *Educational groups* (kelompok pendidikan). Fokus kelompok ini adalah untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks,
5. *Problem solving decision making* (kelompok pemecahan masalah dan pengambilan keputusan). Dalam kelompok ini pihak pemberi dan penerima pelayanan-pelayanan sosial dapat secara bersama-sama terlibat dalam kegiatan. Penerima pelayanan yang masih potensial dapat membentuk kelompok untuk menemukan pendekatan-pendekatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat,
6. *Self help groups* (kelompok bantu diri), adalah suatu kelompok kecil yang tersusun untuk saling membantu dan untuk mencapai tujuan khusus serta bersifat sukarela (Katz dan Bender). Adapun kelompok yang dimaksud adalah; Kelompok yang berfokus perhatian pada pemecahan masalah, kelompok yang berfokus pada advokasi sosial, kelompok yang berfokus untuk menciptakan pola hidup alternatif, kelompok orang-orang yang merasa dirinya tersisih, kelompok gabungan dari masalah-masalah,
7. *Socialization groups* (kelompok sosialisasi). Tujuan kelompok ini adalah untuk mengembangkan atau mengubah sikap-sikap dan perilaku-perilaku anggota kelompok agar lebih dapat diterima secara sosial. Fokus lainnya adalah pengembangan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, dan merencanakan masa depan
8. *Therapeutic groups* (kelompok penyembuhan). Umumnya kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah emosional yang berat. Pemimpin kelompok ini memerlukan keterampilan atau keahlian dalam persepsi, pengetahuan tentang perilaku manusia, dinamika kelompok, kemampuan

melakukan konseling kelompok, dan mampu menggunakan kelompok untuk mengubah perilaku,

9. *Sensitivity groups* (kelompok melatih kepekaan). Tujuan dari kelompok ini adalah memperbaiki masalah kesadaran antar pribadi. Inti kegiatan kelompok ini adalah melakukan percakapan yang mendalam dan jujur tentang alasan berperilaku dalam kelompok.

2.1.2.3 teknik dan Keterampilan dalam Groupwork

Garvin (2011) mengemukakan bahwa dalam penerapan metode *Social Group Work* terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan oleh pekerja sosial untuk memfasilitasi proses kelompok agar berjalan secara efektif, meningkatkan partisipasi anggota, serta membantu kelompok mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di antaranya sebagai berikut:

1. Konfrontasi. Teknik ini dapat membantu anggota kelompok untuk mengungkapkan kecemasan dan kemarahan yang dirasakan anggota kelompok, untuk disampaikan kepada pekerja sosial. Pekerja sosial harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk memberikan respon (tanggapan) terhadap perasaan-perasaan tersebut,
2. Interpretasi. Dengan teknik ini, diberikan kesadaran pada anggota kelompok akan adanya hubungan antara dua rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Perilaku salah seorang anggota kelompok merupakan reaksi dari perilaku anggota kelompok yang lain (satu rangkaian peristiwa),
3. Atribusi. Merupakan suatu teknik untuk menumbuhkan kesadaran yang dimiliki oleh anggota kelompok yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungannya, mengenai hakikat dan penyebab munculnya suatu peristiwa atau kejadian,
4. *Reinforcement* (Memberikan Penguatan). Pekerja Sosial membantu anggota kelompok untuk bertingkah laku tertentu yang diharapkan, dengan cara memberi reward (hadiah) jika dia mampu melakukannya. Reward dapat berbentuk verbal (pujian), fisik (sentuhan hangat), dan material (uang, barang),
5. Pemberian Model. Melalui model atau contoh, pekerja sosial membantu anggota kelompok untuk mempelajari tingkah laku, baik secara implisit (berbicara pelan, sanan eksplisit (observasi terhadap tingkah laku Pekerja Sosial atau anggota kelompok lain pada saat bermain peran).

Adi Fahrudin (2022) menjelaskan terdapat keterampilan mezzo yang harus dimiliki oleh pekerja sosial diantaranya:

1. *Networking* (jaringan atau membangun hubungan), keterampilan untuk membangun dan memelihara hubungan dengan individu, organisasi, dan komunitas yang dapat mendukung tujuan pekerjaan sosial. *Networking* penting untuk kolaborasi dan akses sumber daya.
2. *Team work* (kerja sama tim), kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja tim melibatkan komunikasi yang baik, saling menghargai, dan pemahaman peran masing-masing anggota.
3. *Plan and Conduct Meetings* (merencanakan dan mengadakan pertemuan), keterampilan untuk merancang agenda, mengatur logistik, dan memfasilitasi pertemuan secara efektif. Ini penting untuk memastikan diskusi yang produktif dan pengambilan keputusan yang tepat.
4. *Conflict Management* (manajemen konflik), kemampuan untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam interaksi sosial. Manajemen konflik melibatkan komunikasi yang efektif dan teknik negosiasi untuk mencapai resolusi yang konstruktif.
5. *Recording and Reporting* (pencatatan dan pelaporan), proses mendokumentasikan informasi serta menyusun laporan penting untuk memberikan informasi tentang kemajuan, hasil, dan evaluasi kegiatan. Pencatatan yang akurat sangat penting untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pekerjaan sosial.

2.2. Tahapan dalam Proses Pekerjaan Sosial

2.2.1. Membangun Relasi (Dialog)

Dialog adalah proses yang berisi rangkaian kegiatan dalam membangun relasi dengan masyarakat dan *stakeholder/shareholder* untuk persiapan kerjasama, mengembangkan kepercayaan masyarakat, memaknai tantangan, serta menentukan arah kegiatan yang akan dilakukan praktikan pada praktik komunitas (Gamble & Weil, 2010). Kegiatan dalam tahap ini meliputi:

1. Persiapan Sosial untuk bekerjasama (*preparing to work together*)

Merupakan tahap awal dalam proses kerjasama. Pengenalan diri serta pengenalan warga merupakan inti dari tahap ini. Pekerja sosial masyarakat mulai masuk ke dalam komunitas untuk sebanyak mungkin memperkenalkan apa maksud dan tujuan kehadirannya dalam masyarakat. Pelibatan diri dalam

aktivitas-aktivitas interaksi masyarakat, pertemuan non formal, pertemuan warga, pertemuan keagamaan, kepemudaan, dan sebainya, merupakan strategi yang dapat dilakukan pada tahap ini (Homan, 2016; Hardcastle, Powers, & Wenocur, 2011).

2. Pembentukan dan pengembangan rasa saling percaya (*trust building*) dan pengembangan partnership (*developing partnership*).

Pembentukan kepercayaan dapat dilakukan melalui strategi kontak sosial, komunikasi, interaksi, dan pembiasaan. Proses ini dikenal sebagai *relationship building* yang menjadi dasar untuk membangun *partnership* dengan komunitas dan *stakeholder* (Rothman, 2008; Gamble & Weil, 2010).

3. Pemaknaan tantangan-tantangan (*articulating challenges*)

Kepercayaan serta partnership tidak akan bertahan tanpa tujuan yang jelas. Tujuan akan terdefiniskan dengan jelas melalui menelusuran tantangan yang dihadapi bersama. Untuk itu, deskripsi ancaman, masalah, “stressor” yang dihadapi harus diubah sedemikian rupa menjadi tantangan yang menentukan arah bagi upaya perubahan (Homan, 2016; Hardcastle et al., 2011). Penemuan dan pengenalan sumber daya maupun kekuatan yang dimiliki, kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang keberhasilan di masa depan merupakan sarana yang sangat baik yang dapat mengubah ancaman menjadi tantangan. Ancaman cenderung mengakibatkan orang menjadi takut, cemas, depresi, dan melarikan diri darinya, sedangkan tantangan akan menguatkan orang untuk menghadapinya.

4. Penentuan arah kegiatan (*defining directions*)

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menentukan tujuan dan rencana yang hendak dicapai. Tujuan yang ditetapkan bersama oleh anggota komunitas harus difasilitasi oleh pekerja sosial melalui strategi *Community meeting*, dengan mendorong kesadaran bahwa tujuan kegiatan harus memiliki beberapa karakteristik kunci, antara lain:

- 1) Bersifat realistis, memungkinkan untuk dicapai, tidak mustahil untuk dicapai.
- 2) Dapat diukur sampai sejauh mana ketercapaiannya. Pemecahan tujuan global menjadi tujuan-tujuan kecil yang terukur sangat membantu dalam penetapan target jangka pendek.
- 3) Tujuan-tujuan ini juga harus memiliki kerangka waktu pencapaian.
- 4) Menggambarkan ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan.

Prinsip penetapan tujuan ini mengikuti standar *goal setting* dalam *community organization* (Rothman, Erlich, & Tropman, 2001).

2.2.2. Asesmen (*Discovery*)

Discovery adalah proses yang berisi rangkaian kegiatan penggalan sumber daya, analisis kemampuan serta daya dukung sumber daya yang dimiliki masyarakat. Tahap ini juga mencakup pembentukan Tim Kerja Masyarakat (TKM), merencanakan dan menentukan intervensi, serta menguatkan motivasi kerja sama agar proses pemberdayaan berjalan efektif (Cahaya, 2018; Suharto, 2020). *Discovery* dipandang sebagai langkah awal yang krusial dalam pengembangan masyarakat berbasis aset karena menjadi fondasi untuk melihat potensi lokal secara menyeluruh.

Upaya dalam tahap *discovery* dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menjelajahi, menggali, dan menemukan berbagai sumber daya yang ada dalam masyarakat, termasuk sumber daya alam (*natural capital*), manusia (*human capital*), fisik (*physical capital*), sosial (*social capital*), dan finansial (*financial capital*). Setiap jenis aset dipetakan berdasarkan kapasitasnya untuk menunjang keberlanjutan hidup komunitas sehingga rencana intervensi benar-benar sesuai kebutuhan dan kekuatan lokal.

Kegiatan pemetaan sumber daya ini biasanya dilakukan melalui berbagai teknik yang melibatkan partisipasi aktif warga, seperti *social mapping* dan pendekatan *Sustainable Livelihood Assets* (SLA) yang digunakan untuk menilai dan mengidentifikasi aset kehidupan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana masyarakat memanfaatkan aset mereka untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) kerap digunakan untuk menghasilkan data yang akurat dan menggambarkan kondisi riil masyarakat melalui partisipasi langsung warga. PRA dilengkapi dengan berbagai teknik seperti observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam

2.2.3. Rencana Intervensi (*Discovery*)

1. Analisis kemampuan dan daya dukung sumber daya (*Analyzing resource capabilities*)

Bauman (1990) menjelaskan bahwa analisis pada intinya merupakan suatu aktivitas memahami yang dilakukan dengan cara “mengurai”, yaitu membagi

kesatuan ke dalam bagian-bagian kecil yang mempermudah pemahaman, “Mencari relevansi”, yaitu mencari hubungan antara bagian satu dengan bagian lain, serta “mengaitkan”, yaitu menghubungkan bagian internal dengan faktor eksternal yang ada. Dengan demikian, menganalisis kekuatan adalah mengurai kekuatan apa saja yang dimiliki menjadi bagian-bagian kecil yang memudahkan pemahaman, mencari relevansi antar bagian atau antar kekuatan kecil sebagai bagian dari kekuatan total, serta mengaitkan bagian kecil dari kekuatan dengan dukungan eksternal yang ada di lingkungan luar.

2. Membentuk tim (*Team Building*)

Tim merupakan kelompok yang terdiri dari banyak orang yang memiliki kemauan, semangat, dorongan masing-masing, akan tetapi memiliki kesatuan arah yang sama. Masing-masing anggota komunitas memiliki keunikan tersendiri serta kekuatan yang berbeda-beda. Perbedaan ini disatukan oleh arah dan tujuan bersama.

3. Merencanakan dan Menentukan intervensi (*framing solutions*)

Beraneka ragam alternatif solusi. Kebersamaan warga dilakukan terus menerus untuk saling berbagi pengalaman dan pemikiran, yang akhirnya membentuk pilihan yang ditetapkan bersama sebagai solusi yang disepakati. Pilihan solusi ini harus dibingkai atau diwujudkan dalam suatu pernyataan lugas dan ditampilkan sebagai milik bersama. Pernyataan bersama atas solusi ini harus selalu teringat dan “terpatri” dalam pikiran warga sebagai patokan yang harus selalu memandu langkah kerja warga mencapai tujuan yang dikehendaki.

4. Memperkuat motivasi kerjasama (*strengthening energy to work together*)

Pemahaman antar warga satu sama lain (*Mutual understanding*) tentang kebersatuan (*Sense of “Us”*), kesepakatan bersama (*Mutual Agreement*), perasaan saling memiliki antar warga (*Sense of Belonging*), merupakan instrumen untuk menggerakkan kekuatan (*Instrument for Mobilization*) kerjasama dalam suatu jaringan kerja untuk mencapai tujuan (Bauman, 1990). Oleh karena itu, pekerja sosial masyarakat perlu menjalin hubungan dengan beraneka ragam bentuk kesatuan aktivitas bersama yang dapat saling menguatkan (*mutual understanding, mutual agreement, sense of us, serta sense of belonging*), serta mengembangkan modal sosial

2.2.4. Intervensi (*Development*)

Intervensi pada tingkat makro melibatkan pelaksanaan strategi yang telah direncanakan untuk menciptakan perubahan sosial, ekonomi, atau politik. Contohnya adalah pelaksanaan program pengembangan masyarakat, advokasi kebijakan, atau kampanye sosial. Intervensi makro dapat berupa advokasi untuk mengubah kebijakan publik, membangun kapasitas komunitas, atau menciptakan jaringan kolaborasi antarorganisasi. Netting et al. (2017) menambahkan bahwa pekerja sosial di aras makro sering bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau advokat dalam mengimplementasikan intervensi yang melibatkan banyak pihak. Kegiatan dalam tahap ini meliputi:

1. Mengaktifkan dan menguatkan interaksi sosial (*activating social interaction*) antar kelompok atau kesatuan-kesatuan sosial. Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan, komunikasi, diskusi, perbincangan, maupun aksi-aksi bersama lainnya yang mengarah pada pengembangan Masyarakat.
2. Mengaktifkan dan menggerakkan sumber daya (*activating resource system*). Beberapa permasalahan terkait dengan pemanfaatan sistem sumber (seperti yang telah terurai pada tahap sebelumnya) perlu dihilangkan atau dikurangi sedemikian rupa agar orang yang membutuhkan dapat terhubung dengan sumber yang ada. Mobilisasi juga memerlukan trust antara pelaksana sistem sumber dengan pihak yang membutuhkan. Dengan demikian trust juga harus dikembangkan dengan kuat.
3. Memperluas peluang (*expanding opportunities*) Penggalan dan pengkajian sumber daya dengan baik, penentuan tujuan, serta perencanaan secara lengkap dan detil akan memperluas peluang atau kemungkinan-kemungkinan dalam pemecahan masalah maupun pencapaian hasil. Pengembangan jaringan/modal sosial merupakan salah satu cara untuk memperluas peluang.

2.2.5. Evaluasi (*Development*)

Evaluasi merupakan proses penting dalam pengawasan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat bersama pelaksana perubahan. Evaluasi idealnya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif agar proses pengawasan tidak hanya berasal dari pihak luar, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme internal komunitas sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi membantu menumbuhkan rasa memiliki terhadap program dan meningkatkan akuntabilitas sosial (Isbandi, 2015). Ketika masyarakat

terlibat langsung dalam proses evaluasi, mereka berkesempatan untuk menilai sejauh mana program berjalan efektif, mengidentifikasi hambatan, serta mengusulkan perbaikan secara partisipatif. Melalui cara ini, evaluasi tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi berkembang menjadi proses pembelajaran bersama antara fasilitator dan komunitas

2.2.6. Terminasi dan Rujukan (*Continuity*)

Tahap terminasi merupakan fase akhir dari sebuah proses perubahan dalam pekerjaan sosial komunitas. Isbandi (2013) menjelaskan bahwa tahap ini menandai berakhirnya hubungan kerja antara pekerja sosial dengan komunitas sasaran. Terminasi dapat dilakukan karena masa tugas fasilitator sudah selesai atau karena masyarakat telah mencapai tingkat kesiapan dan kemandirian yang memadai untuk melanjutkan kegiatan tanpa pendampingan intensif. Dalam konteks pengembangan masyarakat, terminasi ideal terjadi ketika komunitas benar-benar mampu mandiri secara teknis dan organisatoris sehingga keberlanjutan program dapat dijamin oleh warga itu sendiri.

Ketika dalam praktik di lapangan, terminasi tidak selalu berlangsung dalam kondisi ideal. Isbandi (2013) menegaskan bahwa penghentian pendampingan sering kali terjadi bukan karena masyarakat sudah mandiri, melainkan akibat keterbatasan waktu pendamping, habisnya pendanaan program, atau kebijakan lembaga yang harus mengalihkan sumber daya. Meskipun demikian, banyak pekerja sosial tetap mempertahankan kontak meskipun tidak secara rutin, terutama ketika mereka merasa bahwa proses perubahan belum tuntas sepenuhnya. Kontak lanjutan ini biasanya dikurangi secara bertahap hingga masyarakat benar-benar mampu mengelola kegiatan secara mandiri.

Selain terminasi, Isbandi (2013) juga menjelaskan adanya tahap rujukan (*referral*) dalam pekerjaan sosial komunitas. Rujukan merupakan proses mengalihkan penanganan masalah atau kebutuhan lanjutan masyarakat kepada lembaga atau pihak lain yang memiliki kompetensi atau sumber daya yang lebih sesuai.

2.3. Peranan Pekerja Sosial dalam *Community Work* dan *Group Work*

Dalam melaksanakan kegiatan praktikum komunitas, ada peran-peran pekerja sosial yang bisa digun akan oleh praktikan. Menurut Spergel dan Zastrow dalam (Isbandi, 2013), peran-peran pekerja sosial makro, yaitu:

1. Fasilitator Dalam berbagai hal, baik dalam tahap pertemuan warga maupun pelaksanaan kegiatan dengan media berkelompok, pekerja sosial dapat memimpin maupun secara informal sebagai anggota kelompok yang dapat membantu kelompok dalam mencapai tujuan. Peran sebagai fasilitator juga mendukung pengembangan masyarakat dengan menyediakan waktu, pikiran, dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Pemercepat perubahan atau Pemungkin (*Enabler*) Pekerja sosial membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitas dalam menangani masalah yang mereka hadapi.
3. Pendidik (*Educator*) Peran pekerja sosial sebagai pendidik khususnya saat melaksanakan praktikum komunitas, yaitu kemampuan dalam menyampaikan berbagai informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.
4. Tenaga Ahli (*Expert*) Peran sebagai tenaga ahli berkaitan dengan bagaimana pekerja sosial memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area. Saran tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat maupun organisasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Broker Peran pekerja sosial sebagai broker dalam konteks praktik pekerjaan sosial makro, tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, dalam setting makro terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya merupakan aspek penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh “keuntungan” maksimal.
6. Mediator Pekerja sosial dalam setting makro sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Pekerja sosial berperan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga,

serta berbagai macam resolusi konflik. Di dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai (*win-win solution*).

7. Pembela Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kelas terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.
8. Perencana Sosial (*Social Planner*) Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas; menganalisisnya; dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Setelah itu, perencana sosial mengembangkan program, mencoba mencari alternatif sumber pendanaan, dan mengembangkan konsensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat ataupun kepentingan.
9. Aktivis (*Activist*) Sebagai *activist*, seorang *community worker* mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar, dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan (*power*) pada kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged group*). Seorang *activist* biasanya memperhatikan isu-isu tertentu, seperti ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku (*injustice*), kesenjangan (*inequity*), dan perampasan hak.

Dubois & Miley dalam Sukoco (2021:65) menyatakan bahwa pekerjaan sosial secara umum mempunyai tiga fungsi pokok yaitu:

1. Fungsi konsultasi untuk pemecahan masalah (*consultancy for problem solving*);
2. Fungsi manajemen sumber (*resource management*), dan
3. Fungsi pendidikan (*education*).

2.4. Tinjauan konseptual yang terkait dengan kasus yang ditangani

2.4.1 Tinjauan Komunitas

2.4.1.1 Pengertian Komunitas

Dalam perspektif sosiologi, komunitas dipahami sebagai sekelompok warga yang berbeda dari masyarakat luas (*society*) karena memiliki kedekatan hubungan, kepedulian bersama, serta tingkat interaksi yang tinggi. Pada dasarnya, masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup bersama di suatu tempat

dan saling berinteraksi. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah komunitas sering kali dipertukarkan dengan istilah masyarakat karena keduanya menunjukkan sekelompok orang yang melakukan aktivitas bersama. Namun demikian, para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggunaan kedua istilah tersebut.

Menurut Edi Suharto (2014), masyarakat memiliki dua cakupan makna, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu, seperti desa, kelurahan, kampung, atau rukun tetangga, dan saling berinteraksi dalam keseharian. Sementara itu, dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada kelompok orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama, meskipun tidak harus tinggal dalam satu wilayah yang sama. Pengertian masyarakat dalam arti sempit inilah yang umumnya dikenal sebagai komunitas.

2.4.1.2. Ciri-ciri Komunitas

Menurut Abidin (2012), sebuah komunitas dapat dikenali melalui beberapa karakteristik penting, yaitu adanya wilayah atau batas geografis tertentu, adanya sekelompok orang yang tinggal di dalamnya, berlangsungnya kehidupan bersama, serta adanya hubungan sosial yang terjalin antaranggota. Karakteristik ini menunjukkan bahwa komunitas terbentuk tidak hanya karena kumpulan individu, tetapi karena adanya interaksi dan kehidupan sosial yang berkesinambungan. Mac Iver dan Charles H. Page (2011) juga menambahkan bahwa komunitas memiliki unsur *common life* dan *community sentiment*, yang tercermin dalam beberapa aspek berikut:

1. Seperasaan

Unsur seperasaan muncul ketika individu dalam komunitas merasa menjadi bagian dari kelompok yang sama. Mereka mengidentifikasi diri sebagai “kami” dan memiliki rasa kebersamaan karena kebutuhan serta kepentingan hidup yang selaras. Kesamaan kebutuhan ini mendorong terbentuknya ikatan emosional antarsesama anggota.

2. Sepenanggungan

Aspek sepenanggungan menunjukkan bahwa setiap individu menyadari fungsi dan perannya dalam kelompok. Mereka memahami bahwa keberadaankomunitas memungkinkan peran itu dijalankan dengan jelas sehingga tercipta kedudukan dan tanggung jawab yang pasti bagi masing-masing anggota.

3. Saling Memerlukan

setiap individu merasakan ketergantungan satu sama lain, baik untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis. Kebutuhan fisik mencakup aspek dasar seperti makanan dan tempat tinggal, sedangkan kebutuhan psikologis meliputi rasa aman dan dukungan ketika menghadapi ancaman atau situasi menakutkan. Ketergantungan ini memperkuat kohesi sosial dalam komunitas.

2.4.1.3. Aset Komunitas

Isbandi Rukminto Adi (2008) menjelaskan bahwa dalam pengembangan masyarakat terdapat enam jenis aset utama yang dapat menjadi dasar kekuatan komunitas., diantaranya yaitu:

1. Modal Fisik (*physical capital*)

Modal fisik merupakan aset dasar yang dapat ditemukan pada setiap komunitas, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Modal ini mencakup berbagai bentuk bangunan dan sarana fisik seperti rumah, pasar, pertokoan, perkantoran, serta infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, jalur kereta, dan jaringan komunikasi. Keberadaan modal fisik menjadi fondasi awal bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sosial dan ekonominya.

2. Modal Finansial (*financial capital*)

Modal finansial adalah dukungan dana yang dimiliki komunitas, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Keberadaan modal ini sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan program, memperluas usaha, dan menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan. Semakin kuat modal finansial, semakin besar kapasitas masyarakat untuk melakukan inovasi pembangunan.

3. Modal Lingkungan (*environmental capital*)

Modal lingkungan mencakup berbagai sumber daya alam yang dapat diakses, dimanfaatkan, atau dikembangkan oleh masyarakat. Aset ini dapat berupa potensi lingkungan yang belum diolah namun memiliki nilai ekonomi, ekologis, atau sosial yang tinggi. Modal lingkungan juga berfungsi sebagai penopang keberlanjutan hidup masyarakat karena berhubungan dengan kenyamanan, keseimbangan alam, dan upaya pelestarian lingkungan.

4. Modal Teknologi (*technological capital*)

Modal teknologi tidak harus berupa perangkat modern atau teknologi tinggi, tetapi lebih kepada ketersediaan teknologi tepat guna yang relevan dengan

kebutuhan masyarakat. Teknologi tersebut dapat membantu mempercepat pekerjaan, meningkatkan efektivitas, atau mendukung inovasi lokal. Akses terhadap teknologi yang sesuai meningkatkan kemampuan komunitas dalam memecahkan masalah secara efisien.

5. Modal Manusia (*human capital*)

Modal manusia merujuk pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat. Aset ini mencakup keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan kompetensi warga yang berperan dalam proses pembangunan. Masyarakat yang memiliki modal manusia yang kuat akan lebih mampu menguasai teknologi, membuat keputusan yang baik, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

6. Modal Sosial (*Social Capital*)

Modal sosial mencakup norma, aturan, nilai, jaringan sosial, serta tingkat kepercayaan (*trust*) yang mengikat warga satu sama lain. Modal ini mengatur pola hubungan sosial dan menjadi dasar terbentuknya kerja sama, solidaritas, dan rasa saling percaya. Modal sosial yang kuat akan mempermudah mobilisasi sumber daya dan meningkatkan efektivitas proses pembangunan masyarakat.

2.4.2 Tinjauan Pemberdayaan

2.4.2.1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produkti yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi Suharto, 2014:57-58).

Pemberdayaan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Proses pemberdayaan yang

menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

2.4.2.2. Tujuan Pemberdayaan

Mardikanto dan Poerwoko (2012) menjelaskan mengenai tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu:

1. Perbaikan Pendidikan (*better education*)

Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendidikan nonformal menjadi penting untuk membangun motivasi belajar sepanjang hidup, tanpa terbatas oleh usia atau waktu.

2. Perbaikan Aksesibilitas (*better accessibility*)

Semangat belajar yang terus berkembang, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi, inovasi, pembiayaan, produk, peralatan, dan lembaga pemasaran.

3. Perbaikan Tindakan (*better action*)

Melalui peningkatan pendidikan dan akses terhadap sumber daya manusia, alam, maupun buatan, masyarakat dapat mengambil tindakan yang lebih efektif dan produktif secara berkelanjutan.

4. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Perbaikan tindakan diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan masyarakat, termasuk memperkuat jaringan kemitraan dan posisi tawar dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi.

5. Perbaikan Usaha (*better business*)

Perbaikan Pendidikan, akses, tindakan, dan kelembagaan yang lebih baik, masyarakat dapat mengelola usaha atau bisnis secara lebih efektif dan efisien.

6. Perbaikan Pendapatan (*better income*)

Peningkatan kualitas usaha akan berdampak pada perbaikan pendapatan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

7. Perbaikan Lingkungan (*better environment*)

Pendapatan yang meningkat memungkinkan masyarakat menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan sosial, mengurangi kerusakan yang disebabkan kemiskinan.

8. Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Kesejahteraan finansial dan lingkungan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup setiap keluarga dan masyarakat.

9. Perbaiki Masyarakat (*better community*)

Perbaiki kondisi kehidupan yang lebih baik dan dukungan lingkungan yang sehat, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya

2.4.2.3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Menurut Soedijanto (2001) telah muncul pemikiran tentang prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Kesukarelaan, artinya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
2. Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dan ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain.
3. Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar.
4. Partisipatif, yaitu keterlibatan semua *stakeholders* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.
5. Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan.
6. Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama *stakeholders*.
7. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan.
8. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.
9. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.

10. Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

2.4.2.4 Indikator Berdaya

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif (Suharto, 1997:215). Parsons et.al (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individu visual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan (Parsons et al., 1994:106)

2.4.3. Tinjauan tentang Penyuluhan Sosial

2.4.3.1. Pengertian Penyuluhan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti alat penerangan atau obor. Penyuluh kemudian dimaknai sebagai seseorang yang bertugas memberikan penerangan atau arahan. Dengan demikian, penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu proses ketika seorang penyuluh menyampaikan informasi kepada orang lain sehingga seseorang yang sebelumnya tidak mengetahui menjadi tahu, dan yang sudah mengetahui menjadi lebih memahami. Selain definisi dari KBBI, terdapat pula beberapa pendapat ahli mengenai penyuluhan.

Ban dalam Febriyanti dkk. (2020:9) menjelaskan bahwa penyuluhan merupakan suatu bentuk intervensi sosial yang secara sengaja memanfaatkan komunikasi informasi guna membantu masyarakat membentuk pandangan serta membuat keputusan yang tepat. Sementara itu, Margono dalam Febriyanti dkk. (2020:9) menekankan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

2.4.3.2. Tujuan Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial memiliki sejumlah tujuan yang dapat memberikan dampak positif bagi kelompok sasaran. Menurut Febriyanti dan rekan-rekannya (2020:11), tujuan penyuluhan sosial antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan pertama dari penyuluhan sosial adalah untuk memperluas wawasan serta membangun pemahaman yang seragam di antara berbagai pihak terkait dengan cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial, agar setiap individu atau kelompok memiliki pengertian yang sama tentang aksi-aksi kesejahteraan yang dilakukan.

2. Meningkatkan kualitas dan komitmen dalam pelaksanaan pelayanan sosial.

Tujuan kedua penyuluhan sosial adalah meningkatkan mutu serta kesungguhan pelaksanaan pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Hal ini penting agar intervensi layanan menjadi lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan sosial secara tepat.

3. Menynergikan sumber daya manusia penyuluh sosial dalam kegiatan kesejahteraan sosial.

Tujuan ketiga dari penyuluhan sosial adalah membangun sinergi di antara para penyuluh sosial yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial, sehingga terdapat koordinasi dan kolaborasi yang kuat dalam berbagai upaya pemberdayaan dan pelayanan.

2.4.3.3. Fungsi Penyuluhan Sosial

Penyuluh sosial adalah individu yang memiliki tugas utama untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Menurut Febriyanti dan rekan-rekannya (2020:14), terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan oleh penyuluh sosial, yaitu:

1. Penyuluh sosial diharapkan mampu membimbing masyarakat, khususnya kelompok Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.
3. Penyuluh sosial turut berperan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.

4. Melaksanakan pembinaan masyarakat melalui berbagai bentuk pendekatan, seperti represif, preventif, dan rehabilitatif.

2.4.4. Tinjauan tentang Peningkatan Kapasitas

2.4.4.1. Pengertian Peningkatan Kapasitas

Kapasitas menurut Morgan dalam Kristi Oktavia Wompers (2019) diartikan sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumberdaya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja, dan system yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu

Peningkatan kapasitas adalah suatu proses atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan system-sistem dalam rangka memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

World Bank yang dikutip oleh Riyadi Suprpto (2010), perhatian peningkatan kapasitas meliputi:

1. Pengembangan sumberdaya manusia, training, rekrutmen dan pemutusan pegawai professional, manajerial dan teknis.
2. Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen.
3. Jaringan kerja, berupa koordinasi, aktivitas organisasi, fungsi jaringan kerja serta interaksi formal dan informal.
4. Lingkungan organisasi, yaitu aturan dan undang-undang yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antar Lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi pengembangan tugas serta dukungan anggaran dan keuangan.
5. Lingkungan kegiatan lainnya yang meliputi faktor-faktor politik, ekonomi serta situasi kondisi yang mempengaruhi kinerja

2.4.4.2. Keterkaitan Peningkatan Kapasitas dengan pemberdayaan

Peningkatan kapasitas merupakan unsur fundamental dalam proses pemberdayaan karena pemberdayaan pada hakikatnya adalah upaya meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat agar mampu mengendalikan kehidupan serta menentukan pilihan secara mandiri. Pemberdayaan tidak hanya

dimaknai sebagai pemberian bantuan, melainkan sebagai proses memperkuat kemampuan internal agar masyarakat memiliki daya untuk keluar dari permasalahan sosial yang dihadapi.

Menurut Eade (1997), peningkatan kapasitas adalah proses penguatan kemampuan individu dan kelompok untuk menjalankan fungsi, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan secara efektif. Proses ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Tanpa peningkatan kapasitas, masyarakat cenderung tetap bergantung pada pihak luar sehingga tujuan pemberdayaan sulit tercapai.

Ife (2013) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berfokus pada peningkatan kapasitas internal komunitas, seperti pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kritis, agar masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan inti dari proses pemberdayaan itu sendiri.

Perspektif pekerjaan sosial komunitas, Guti rrez dan Gant (2016) menekankan bahwa peningkatan kapasitas merupakan strategi kunci dalam praktik pemberdayaan karena membantu individu dan komunitas meningkatkan kontrol atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Peningkatan kapasitas bukan tujuan akhir, melainkan alat strategis untuk mencapai pemberdayaan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

2.4.5.1 Pengertian Kemiskinan

Kompleksitas kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti aspek ekonomi dan dimensi sosial, budaya, politik, dan psikologis. Secara umum kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang kompleks dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi sosial ekonomi yang tidak terpenuhinya hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi atau kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terendah serta tidak mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, dan menikmati hidup (Rintuh, 2003; Atalay, 2015) dalam (Melliny dkk., 2022).

World Bank mengukur garis kemiskinan absolut dengan pendapatan di bawah \$1/hari dan kemiskinan menengah \$2/hari. Badan Pusat Statistik (BPS)

mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu jumlah pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Garis kemiskinan makanan ditetapkan berdasarkan kebutuhan energi minimum 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan meliputi kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2023). Definisi tersebut menekankan pada dimensi ekonomi dari kemiskinan, di mana rendahnya pendapatan menjadi penyebab utama keterbatasan akses terhadap sumber daya.

2.4.5.2. Indikator kemiskinan

Indikator kemiskinan yang digunakan di Indonesia, terutama oleh Badan Pusat Statistik (BPS), utamanya didasarkan pada pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan diukur melalui Garis Kemiskinan (GK). *Poverty Line* atau Garis Kemiskinan merupakan nilai minimum pengeluaran per-kapita per-bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan memiliki dua komponen yaitu.

1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

Nilai pengeluaran dihitung berdasarkan kebutuhan energi minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per-kapita per-hari. Diwakili oleh harga dari sekitar 52 jenis komoditas makanan.

2. Garis Kemiskinan Non-makanan (GKNM)

Nilai minimum pengeluaran untuk kebutuhan pokok non-makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Diwakili oleh harga dari sekitar 47 hingga 51 jenis komoditas non-makanan.

Terdapat tiga indikator kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendekatan kebutuhan, yaitu.

1. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Persentase ini disebut dengan *Head Count Index*, yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin (yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan) terhadap total penduduk di suatu wilayah.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI)

Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap

Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilainya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan, mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan semakin parah.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indikator ini disebut sebagai *Poverty Severity Index*, yaitu digunakan untuk Memberikan gambaran mengenai penyebaran (ketimpangan) pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

World Bank mengukur kemiskinan tingkat individu dengan menggunakan ukuran kemiskinan ekstrem global, yaitu hidup dengan pendapatan di bawah USD 2,15 per hari (berdasarkan PPP tahun 2017). Selain itu konsep multidimensi kemiskinan mengukur kemiskinan melalui keadaan kekurangan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih kompleks.

Indikator lain yang sering digunakan untuk mengukur kemiskinan atau menentukan rumah tangga miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi perorang
2. Jenis lantai dan dinding tempat tinggal yang terbuat dari tanah dan bahan murah (tanah/bambu/kayu murahan)
3. Tidak memiliki fasilitas buang air bersih yang layak
4. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik
5. Kualitas air minum tidak bagus
6. Bahan bakar memasak menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah
7. Pola konsumsi makanan (daging/ayam/susu) kurang
8. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga
9. kekayaan atau kepemilikan aset (tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual seperti motor/emas)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), menjelaskan bahwa indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari:

1. Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang layak: Menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar fisik seperti makanan bergizi, pakaian, dan tempat tinggal yang aman. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif.

2. Mencerminkan keterbatasan akses terhadap aset produktif seperti lahan atau peralatan, yang menghambat kemampuan menghasilkan pendapatan dan meningkatkan risiko ketergantungan pada bantuan.
3. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis: Rendahnya literasi membatasi akses pendidikan dan peluang kerja, sehingga memperkuat ketidaksetaraan sosial.
4. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup: Ketidakadaan perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan atau jaminan sosial membuat individu rentan terhadap risiko ekonomi tak terduga.
5. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi: Menunjukkan ketidakmampuan pulih dari krisis seperti bencana atau fluktuasi harga sehingga memperdalam kemiskinan kronis.
6. Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah: Kurangnya kekuatan berpartisipasi dalam keputusan sosial atau ekonomi menyebabkan marginalisasi, seperti dalam negosiasi upah atau akses layanan.
7. Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas: Hal ini dapat disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya yang mahal, sehingga kesempatan memperoleh pendidikan menjadi terbatas.

2.4.5.3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Solikatun, Supono dan Yulia Masrurroh (2014) merumuskan beberapa penyebab kemiskinan, di antaranya:

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Namun lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal.
2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
3. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

4. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan. Dan yang paling penting adalah ketidakmerataannya distribusi pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2.4.5.4. Karakteristik Kemiskinan

Menurut Suryawati (2004) mengklasifikasikan kemiskinan menjadi lima bentuk yang berbeda, yaitu:

1. kemiskinan absolut, yaitu kondisi ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan.
2. kemiskinan relatif, yaitu keadaan seseorang yang sebenarnya telah berada di atas garis kemiskinan, namun masih memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan standar hidup masyarakat di sekitarnya.
3. kemiskinan kultural, yaitu bentuk kemiskinan yang berkaitan dengan sikap atau pola pikir individu atau kelompok yang tidak memiliki kemauan untuk memperbaiki kondisi hidupnya meskipun telah ada bantuan atau dukungan dari pihak lain.
4. Kemiskinan struktural Kemiskinan struktural merupakan varian kemiskinan yang muncul akibat terbatasnya akses terhadap sumber daya. Biasanya, kondisi ini terjadi dalam kerangka tatanan sosial, budaya, atau politik yang tidak mendukung upaya pembebasan dari kemiskinan. Jenis kemiskinan ini terkadang mencakup elemen diskriminatif.
5. Kemiskinan kultural, Kemiskinan kultural merujuk pada bentuk kemiskinan yang timbul akibat sikap dan norma-norma yang umumnya diakui oleh individu atau masyarakat dan memiliki akar dari tradisi atau budaya yang cenderung tetap atau tidak mengalami perkembangan menuju perbaikan taraf hidup yang lebih modern atau lebih baik.

2.4.6. Tinjauan tentang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

2.4.6.1. Pengertian Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) merupakan salah satu kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pedoman Pendataan

dan Pengelolaan Data PPKS dan PSKS. Kategori ini digunakan untuk mengidentifikasi perempuan yang membutuhkan perhatian dan intervensi sosial karena kondisi ekonomi yang tidak mencukupi.

Regulasi tersebut dijelaskan bahwa PRSE adalah perempuan dewasa berusia 18 hingga 59 tahun, baik yang berstatus menikah, belum menikah, maupun janda, yang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Batasan ini menekankan bahwa kerentanan sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh perempuan janda, tetapi juga oleh perempuan yang belum menikah atau sudah menikah apabila mereka tetap berada dalam kondisi ketidakcukupan ekonomi.

PRSE dapat dipahami sebagai perempuan dewasa yang mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehingga berada dalam situasi rentan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kehilangan pasangan melalui perceraian atau kematian, yang membuat perempuan harus mengambil alih peran sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Selain itu, perempuan belum menikah yang menjadi tulang punggung keluarga karena orang tua telah meninggal atau tidak mampu bekerja juga termasuk dalam kategori PRSE, karena mereka memikul tanggung jawab ekonomi keluarga tanpa dukungan memadai.

2.4.6.2. Indikator Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu atau kelompok yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan tertentu sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, kelompok ini membutuhkan dukungan pelayanan dan intervensi sosial agar dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu kategori PPKS yang diatur dalam regulasi tersebut adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Permensos No. 8 Tahun 2012 menjelaskan bahwa PRSE merupakan perempuan dewasa berusia 18 hingga 59 tahun, baik yang sudah menikah, belum menikah, maupun berstatus janda, yang tidak memiliki penghasilan memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-

hari. Ketentuan ini memberikan gambaran bahwa PRSE tidak hanya terbatas pada perempuan janda, tetapi juga perempuan lain yang mengalami keterbatasan ekonomi dan kerentanan sosial.

Adapun indikator PRSE berdasarkan Permensos No. 8 Tahun 2012 meliputi: (1) perempuan berusia 18 sampai 59 tahun; (2) istri yang ditinggalkan suami, baik karena meninggal dunia maupun pergi tanpa kejelasan; (3) perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga; dan (4) perempuan yang memiliki pendapatan rendah atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Keempat indikator ini menggambarkan adanya beban tanggung jawab serta keterbatasan sumber daya yang meningkatkan risiko kerentanan sosial ekonomi.

Berdasarkan indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan dalam kategori PRSE umumnya menghadapi keterbatasan modal, pendidikan, dan keterampilan, sehingga sulit meningkatkan kualitas hidup jika hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Kerentanan ini dapat disebabkan oleh kehilangan suami, minimnya peluang kerja, beban keluarga yang berat, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya keterampilan kerja. Dengan demikian, kelompok ini memerlukan dukungan, pendampingan, dan kebijakan khusus agar dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik serta menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

2.4.6.3. Faktor Penyebab Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Menurut Yoke Pradila et al (2022:72) faktor-faktor penyebab terjadinya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pertama penyebab Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah karena mereka harus menjadi kepala rumah tangga (Tulang Punggung).
2. Faktor penyebab kedua yang menyebabkan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah tingkat pendidikan.
3. Faktor ketiga adalah masih adanya rasa kurang percaya diri, apatis dan rendah diri serta aspirasi material yang tinggi.
4. Faktor keempat adalah keterbatasan akses mereka terhadap pekerjaan, sedikit jaringan kekerabatan yang mendukungnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam. Dari sini penting untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor tersebut

untuk meningkatkan kondisi dan kesempatan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

2.4.6.4. Masalah yang Dihadapi oleh Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Menurut Sarah Apriandira et al. (2014:28), permasalahan yang dialami oleh Perempuan Rawan Sosial Ekonomi meliputi hal-hal berikut:

1. Pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki pada umumnya masih rendah.

Banyak Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menghadapi keterbatasan dalam kemampuan dasar, baik dari segi wawasan maupun keterampilan praktis, sehingga menyulitkan mereka untuk bersaing dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Kesempatan kerja bagi perempuan dalam proses produksi masih terbatas.

Akses perempuan untuk terlibat dalam kegiatan produktif sering kali dibatasi oleh kondisi lapangan kerja yang kurang mendukung, sehingga peluang mereka untuk bekerja atau memperoleh pendapatan layak menjadi lebih kecil.

3. Kondisi sosial keluarga yang tidak memberikan dukungan.

Lingkungan keluarga yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan signifikan, karena perempuan tidak mendapatkan motivasi ataupun bantuan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga.

4. Menghadapi kesulitan dalam aspek ekonomi.

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sering berada dalam situasi finansial yang berat, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki kondisi hidup mereka.

5. Mengalami produktivitas serta tingkat upah yang rendah.

Rendahnya keterampilan dan terbatasnya peluang kerja membuat mereka cenderung bekerja pada sektor dengan upah minim dan produktivitas rendah.

6. Kurangnya akses atau kesempatan terhadap pendidikan yang memadai.

Pendidikan yang tidak mencukupi menjadi salah satu penyebab utama keterbatasan kemampuan mereka dalam memperoleh pekerjaan atau meningkatkan taraf hidup.

7. Rentan mengalami tindakan yang tidak diinginkan.

Kerentanan ekonomi dan sosial membuat perempuan dalam kategori ini lebih mudah mengalami risiko tindakan yang merugikan, baik dalam bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun penelantaran.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi berada dalam kondisi yang dapat memperkuat

lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan. Oleh sebab itu, diperlukan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk membantu mereka keluar dari permasalahan tersebut, melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, serta penguatan dukungan sosial.

2.4.6.5. Dampak yang ditimbulkan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Menurut Hidayat dan Khoirudin (2019:125), terdapat beberapa dampak yang muncul akibat kondisi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).

1. kondisi ekonomi keluarga yang rendah dapat menyebabkan anak mengalami ketelantaran, baik dalam pengasuhan maupun pendidikan. Ketidakstabilan ekonomi tersebut berpotensi menghambat proses pendidikan anak dan berpengaruh terhadap masa depannya.
2. keadaan ini juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial antarindividu dalam masyarakat, karena keterbatasan ekonomi membuat PRSE berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.
3. Beban peran ibu menjadi semakin berat, karena selain bertanggung jawab dalam mengasuh serta mendidik anak, perempuan yang berada dalam kondisi PRSE juga harus mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
4. Dalam situasi tertentu, tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat mendorong sebagian perempuan untuk terlibat dalam praktik-praktik yang tidak diharapkan, seperti menjadi wanita tuna susila, demi memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan yang dialami PRSE tidak hanya menimbulkan dampak bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga memicu munculnya permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penanganan dan intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan PRSE, sehingga kondisi tersebut tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih kompleks.

2.5. Regulasi yang mendukung penanganan kasus

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) melalui pelatihan penanaman sayuran dengan media polybag, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum serta penguat penyelenggaraan kegiatan. Regulasi tersebut mencakup kebijakan pemerintah,

undang-undang, dan program nasional yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan serta memperkuat kapasitas masyarakat.

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Undang-undang ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam akses pendidikan, kesempatan kerja, maupun partisipasi sosial. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan yang bertujuan memperluas akses perempuan terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Regulasi ini mengatur kesetaraan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah dorongan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan. Oleh karena itu, program pelatihan penanaman sayuran di Desa Haurkuning dapat berlandaskan pada regulasi ini sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan peluang kerja bagi PRSE.

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan.

Peraturan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan nasional, termasuk melalui penguatan keterampilan. Rencana Aksi Nasional ini mendukung berbagai inisiatif pemberdayaan di tingkat lokal, seperti program pelatihan penanaman sayuran menggunakan polybag, karena dapat membuka akses ekonomi dan meningkatkan kemandirian PRSE.

4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

PNPM merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas, perbaikan akses terhadap sumber daya, dan peningkatan partisipasi komunitas. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, PNPM dapat menjadi dukungan penting karena menyediakan pendanaan, pendampingan teknis, dan fasilitas bagi kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat langsung bagi perempuan.

5. Peraturan Daerah tentang Penanganan Kemiskinan serta Peraturan Bupati mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Regulasi di tingkat daerah ini mengatur arah kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk pemberian bantuan sosial, pengembangan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses layanan dasar. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun prioritas program tahunan,

BAB III

KONTEKS PRAKTIKUM KOMUNITAS

3.1. Gambaran Umum Komunitas Lokasi Praktikum

3.1.1. Sejarah Desa

Sebelum tahun 1982, wilayah yang kini menjadi Desa Situsari merupakan bagian dari Desa Gunungsirah dan dikenal sebagai Kampung Situsari. Pada saat itu, Desa Gunungsirah dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Nusi. Menurut cerita masyarakat, Kampung Situsari dulunya digunakan sebagai tempat persembunyian warga ketika terjadi Gerakan DI (Gorombolan). Nama “Situsari” diyakini berasal dari istilah *cai nyumput*, yang berarti “air yang tersembunyi” atau “tempat persembunyian”, yang kemudian menjadi identitas wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa kawasan ini pernah menjadi tempat beristirahat para Wali Songo, sehingga Situsari memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang kuat. Beberapa tokoh berpengaruh dalam sejarah Situsari antara lain Syekh Ahmad bin Huas, seorang ulama yang dianggap wali di kampung tersebut, serta Embah Haji Larangan atau “Embah Haji Goong” yang berdakwah melalui media gamelan.

Pada tahun 1982, Kampung Cirumput dimekarkan dari Desa Gunungsirah dan secara resmi menjadi Desa Situsari. Kepemimpinan awal dijabat oleh Penjabat Sementara, Bapak H. Bahrudin, dibantu juru tulis Bapak Ugan Sugandi, hingga tahun 1986. Sejak saat itu, pergantian para pemimpin desa serta partisipasi aktif masyarakat telah mendorong pembangunan Desa Situsari, baik dalam aspek fisik maupun mental-spiritual. Menurut Abah Sahroni, salah satu sesepuh desa yang kini berusia hampir 90 tahun, nama Desa Situsari juga merujuk pada Balong Cirumput (*cai nyumput*), tempat Sunan Situsari, Mbah Syekh Ahmad, beristirahat. Sunan Situsari berasal dari Pamijahan, Pangandaran, dan menetap di Kampung Cirumput bersama kedua putrinya, Nyi Rarangan dan Nyimas Sri Asih. Cerita masyarakat menyebutkan bahwa Nyi Rarangan menolak lamaran karena calon dianggap tidak sesuai dalam hal agama. Peristiwa ini kemudian menjadi asal mula mitos bahwa setiap generasi di Desa Situsari selalu ada individu yang tidak menikah atau tidak pernah berpacaran. Selain itu, masyarakat masih meyakini berbagai cerita dan kepercayaan lain yang berkembang, meskipun belum terdokumentasikan secara resmi

3.1.2. Kondisi Geografis

Desa Situsari merupakan salah satu dari 19 desa yang berada di Kecamatan Darma. Desa ini memiliki topografi berupa perbukitan yang luas dengan total wilayah sekitar 204,4 hektar. Secara geografis, Desa Situsari memiliki batas-batas wilayah yang jelas, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan kaki Gunung Ciremai, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Darma dan Desa Karanganyar, sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunungsirah, serta sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangsari dan Desa Bakom.

Desa Situsari terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Situsari 1 yang terdiri dari RT 01 dan RT 02, serta Dusun Situsari 2 yang terdiri dari RT 03, RT 04, dan RT 05. Desa ini memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi iklim tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pertanian masyarakat, karena menentukan waktu tanam, jenis tanaman yang dibudidayakan, serta teknik pengelolaan lahan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap musim dan pola cuaca menjadi faktor penting dalam perencanaan kegiatan pertanian dan pengembangan ekonomi lokal di Desa Situsari.

Tabel 3.1. Kondisi Geografis Desa Situsari

JENIS ASET	LUAS WILAYAH (HEKTAR)
Perkebunan	150
Pemukiman	52
Perkantoran	0,8
Lainnya	18,4
JENIS RUMAH	JUMLAH
Rumah Semi Permanen	200
Rumah Permanen I	13
Rumah Permanen II	10
Rumah Biasa/Bilik	2

Sumber: Data desa situsari

3.1.3. Kondisi Demografis

Secara umum, Desa Situsari berada pada ketinggian sekitar 198 meter di atas permukaan laut. Topografi wilayah desa ini bervariasi, dengan 0,1% area merupakan dataran, 0,5% berbukit, dan 0,6% berupa lereng. Suhu rata-rata harian di desa ini mencapai 22°C dengan tingkat kelembaban udara sekitar 33%,

sedangkan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 2.883 mm. Dari segi jarak, Desa Sitisari cukup strategis, yaitu berjarak 0,5 km dari ibu kota kecamatan, 17 km dari ibu kota kabupaten, 180 km dari ibu kota provinsi, dan sekitar 454 km dari ibu kota negara, sehingga memudahkan akses ke pusat pemerintahan maupun fasilitas publik.

Perkembangan jumlah penduduk di Desa Sitisari cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun laju pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Hingga akhir tahun ini, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.666 jiwa, terdiri dari 884 laki-laki dan 782 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 809, yang menunjukkan bahwa rata-rata setiap kepala keluarga membina sekitar dua anggota keluarga. Data kependudukan ini menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan desa, termasuk penyediaan sarana dan prasarana umum, layanan kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan masyarakat, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan warga dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

3.1.4. Kondisi Pendidikan

Desa Sitisari memiliki fasilitas pendidikan yang tergolong cukup memadai, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga pesantren. Meskipun demikian, masih banyak warga desa yang hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SD. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat Desa Sitisari.

Tabel 3.2. Sarana Pendidikan Desa Sitisari

SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
Pesantren	3
Sekolah Dasar	1
Paud	1

Sumber: Data desa situari

Fasilitas pendidikan yang tersedia saat ini sudah cukup mendukung kebutuhan belajar masyarakat, sehingga menjadi sarana penting untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan warga di masa depan. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai ini juga menjadi modal penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan literasi, kemampuan

dasar, dan kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi.

Berdasarkan data pendidikan penduduk, masyarakat Desa Sitisari dapat dikelompokkan menurut tingkat pendidikan yang telah ditempuh, sehingga memberikan gambaran mengenai distribusi pengetahuan dan potensi sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Hal ini juga menjadi dasar bagi perencanaan program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif di Desa Sitisari.

Tabel 3.3. Tingkat pendidikan Desa Sitisari

No.	KATEGORI	JUMLAH
1.	Lulusan SD/Sederajat	1.300
2.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	1.000
3.	Lulusan SLTP/Sederajat	250
4.	Lulusan SLTA/Sederajat	77
5.	Lulusan S1	11
6.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	11
7.	Lulusan D3/Sederajat	3
8.	Lulusan D2/Sederajat	2
9.	Lulusan S2	2

Sumber: Data desa situsari

3.1.5. Kondisi Ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Sitisari memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, baik sebagai petani sawah, petani kebun, buruh tani, maupun kuli bangunan. Kondisi geografis desa yang masih memiliki lahan tegalan dan perkebunan mendukung pertanian sebagai sektor utama perekonomian. Lahan yang subur ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam berbagai komoditas, seperti padi, singkong, dan tanaman lainnya. Sebagian besar penduduk yang bekerja di bidang pertanian menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia yang besar di sektor ini. Oleh karena itu, keberadaan kelompok tani sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas para petani. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan sarana dan fasilitas pertanian, serta dukungan ekonomi dari pemerintah desa atau pihak terkait.

Data kependudukan dan perekonomian menunjukkan jumlah keluarga yang termasuk dalam kategori miskin dan pra-sejahtera, yaitu: 185 KK miskin, 185 KK keluarga pra-sejahtera KS (1), dan 23 KK KS (2). Selain itu, sarana perekonomian

desa meliputi jalan desa sepanjang 250 meter, jalan lingkungan 1.500 meter, luas sawah 0,3 hektar, irigasi 0,3 hektar, serta keberadaan dua kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Dengan kondisi ini, Desa Sitisari memiliki potensi yang cukup untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan bertani, pemanfaatan sarana pertanian, serta penguatan jaringan kelompok tani untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan warga desa.

Tabel 3.4. Jenis pekerjaan masyarakat Desa Sitisari

No.	KATEGORI	JUMLAH
1.	Buruh	350
2.	Wirausaha Lainnya	200
3.	Peternak	30
4.	Petani	25
5.	Aparat Desa	9
6.	PNS	7
7.	Guru PAUD	7
8.	Pedagang Keliling	5
9.	Montir	3
10.	Pensiunan PNS	3
11.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	3
12.	Guru SD	2
13.	Seniman	1
14.	Guru SLTP	1

Sumber: Data desa sitisari

3.1.6. Kondisi Sosial, Budaya, dan Spritual

Seluruh penduduk Desa Sitisari memeluk agama Islam, sehingga kehidupan sosial masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius. Kegiatan keagamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari, seperti pengajian rutin yang hampir dilaksanakan setiap hari, serta perayaan muludan atau Maulid Nabi yang selalu mendapat partisipasi aktif dari masyarakat. Kegiatan keagamaan ini turut memperkuat solidaritas antarwarga dan membangun rasa kebersamaan di dalam komunitas. Selain kehidupan keagamaan yang kuat, Desa Sitisari juga tetap melestarikan tradisi dan budaya

lokal yang menjadi identitas desa. Perpaduan budaya Sunda dan nilai-nilai Islam terlihat jelas dalam berbagai kegiatan adat dan kesenian, seperti seni rudat. Kesenian rudat tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyampaian pesan-pesan agama melalui syair-syair yang dibawakan oleh para ulama dan santri. Kegiatan ini melibatkan warga dari berbagai kalangan usia, mulai dari generasi muda hingga lanjut usia, sehingga menjadi wahana interaksi sosial lintas generasi.

Beberapa tradisi lain yang masih dijaga dan dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat antara lain munggahan, yang dilakukan sebagai persiapan menyambut bulan Ramadhan, serta muludan sebagai peringatan bulan Maulid Nabi. Pelestarian tradisi ini bukan hanya sebagai wujud ibadah, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat identitas budaya, menjaga nilai-nilai sosial, dan membangun rasa kebersamaan serta tanggung jawab sosial antaranggota masyarakat Desa Situsari. Selain itu, keberadaan tradisi dan kegiatan keagamaan ini juga berfungsi sebagai media edukasi sosial, di mana anak-anak dan generasi muda belajar untuk menghargai adat, memahami nilai agama, serta menumbuhkan rasa hormat terhadap para sesepuh dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, kehidupan keagamaan dan budaya di Desa Situsari tidak hanya menjadi bagian dari praktik spiritual, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan karakter dan sosial masyarakat.

3.1.7. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Desa Wisata yang Maju Unggul Mandiri dan Agamis Melalui Desa Unggul Dalam Prestasi

Dalam visi Desa Situsari tersebut terdapat beberapa kata kunci yaitu maju, mandiri, kondusif, Sejahtera dan unggul merupakan representasi terhadap beberapa kondisi berikut:

- 1) Maju, artinya perkembangan pemerintah Desa Situsari selalu menuju ke arah perbaikan dan mengikuti perkembangan zaman.
- 2) Mandiri, mengandung arti bahwa Desa Situsari dalam segala bidang memiliki hak otonomi yang mantap tanpa ketergantungan pada pihak lain. Serta mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, mampu mengakses

sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

- 3) Unggul, mengandung arti bahwa dengan beragam potensi yang dimiliki Desa Sitisari akan mampu berprestasi minimal sama maksimal lebih dari desa lain, dalam segala bidang.

2. Misi

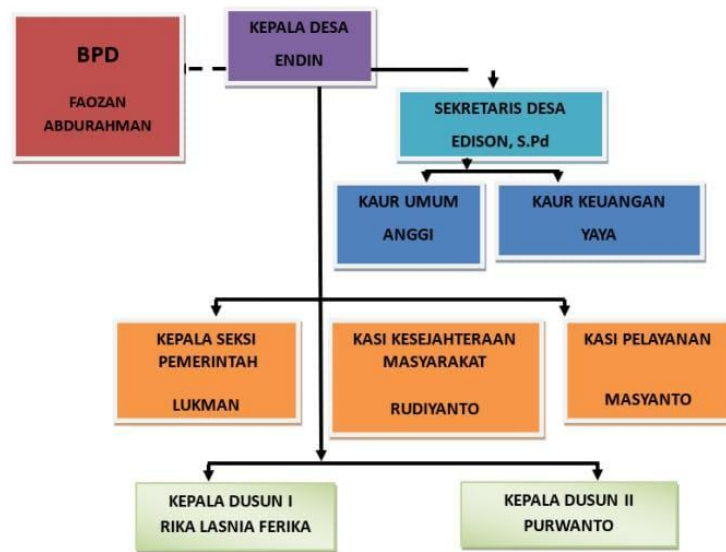
- 1) Mewujudkan lingkungan Masyarakat yang aman, tertib, dan teratur.
- 2) Mewujudkan lingkungan Masyarakat yang mandiri dengan membangun semangat kebersamaan, musyawarah, gotong royong dan Kerjasama antar warga Masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan Pembangunan.
- 3) Meningkatkan dan memantapkan pencapaian angka indeks Pembangunan manusia melalui akselerasi peningkatan derajat Pendidikan, Kesehatan, ekonomi serta daya beli Masyarakat.
- 4) Meningkatkan dan memantapkan SDM melalui akselerasi peningkatan derajat Pendidikan, Kesehatan, ekonomi serta daya beli Masyarakat menuju desa unggul dan berprestasi.

3.1.8. Struktur Pemerintah Desa Sitisari

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Sitisari Kabupaten Kuningan pada saat ini terdiri dari :

Kepala Desa	: ENDIN
Ketua Badan Permusyawaratan Desa	: U. FAUZAN A.R
Sekretaris Desa	: EDISON, S.Pd
Bidang Keuangan	: YAYA
Bidang Umum	: ANGGI PRATAMA
Bidang Pemerintahan/ <i>ngabihi</i>	: LUKMAN
Bidang Ekonomi Pembangunan/ <i>Raksabumi</i>	: MASYANTO
Bidang Kesejahteraan Masyarakat	: RUDIYANTO
Kadus I	:RIKALASNIA FERIK
Kadus II	: PURWANTO

Untuk lebih jelas struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Sitisari Kabupaten Kuningan dapat dilihat dalam bagan berikut:



Bagan 3.1. Struktur organisasi Desa Sitisari
Sumber: Data Desa Sitisari

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi;
17. Startegi adalah langkah-langkah berisikan program-program indicator untuk mewujudkan visi;
18. Desa adalah desa Sitisari Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
19. Dusun/Kampung adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa Sitisari Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
20. Rukun Warga adalah wilayah kerja Kepala Desa yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

3.2. Program/Layanan yang diberikan Komunitas

3.2.1. Program/ Layanan Administrasi Kependudukan

Program dan layanan administrasi kependudukan di Desa Sitisari dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui Sekretaris Desa beserta Kepala Urusan (Kaur) yang menangani bidang terkait. Layanan ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen penting yang menjadi kebutuhan administratif sehari-hari. Dokumen yang difasilitasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta surat pindah domisili bagi warga yang melakukan perpindahan tempat tinggal. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan layanan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan warga, seperti akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, dan akta perceraian, sehingga seluruh catatan sipil masyarakat dapat tersimpan dengan baik dan memiliki dasar hukum yang sah untuk berbagai kepentingan administratif maupun legal.

Selain dokumen kependudukan, pemerintah desa juga menyediakan layanan pembuatan surat-menyurat yang diperlukan masyarakat, seperti Surat Keterangan Usaha (SKU), surat keterangan domisili, surat pembelian tanah, dan dokumen administrasi lainnya. Tersedianya layanan ini membantu masyarakat memperoleh dokumen resmi tanpa harus menempuh proses panjang ke tingkat kecamatan atau kabupaten, sehingga mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi. Keberadaan program administrasi kependudukan yang komprehensif ini tidak hanya mempermudah urusan warga, tetapi juga mendukung tertib administrasi desa, memperkuat legalitas data kependudukan, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat desa,

yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3.2.2. Program/Layanan Kesejahteraan

Program dan layanan kesejahteraan di Desa Situsari dilaksanakan melalui Kasi Kesejahteraan, yang memiliki tugas utama mengoordinasikan berbagai program guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Kasi Kesejahteraan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh kegiatan pemberian bantuan sosial dapat berjalan dengan tertib, tepat sasaran, dan efektif. Layanan yang diberikan meliputi pendampingan masyarakat dalam proses pengajuan bantuan, pemantauan penerima manfaat, hingga memastikan distribusi bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah sampai ke tangan warga yang membutuhkan. Peran Kasi Kesejahteraan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus menjadi pengawas agar bantuan sosial dapat dirasakan manfaatnya secara merata.

Berbagai program bantuan yang disalurkan bertujuan untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat desa. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), pemberian sembako, BPJS, hingga Makanan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya program-program tersebut, masyarakat yang tergolong rentan sosial dan ekonomi dapat memperoleh perlindungan sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan Desa Situsari. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga desa.

3.2.3. Program/Layanan Kesehatan

Program dan layanan kesehatan di Desa Situsari diselenggarakan melalui kerja sama yang erat dengan Puskesmas Darma. Kerja sama ini mencakup penyelenggaraan berbagai kegiatan kesehatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga lanjut usia. Salah satu program utama adalah posyandu untuk ibu dan anak, yang berfokus pada pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta edukasi gizi dan

kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Selain itu, terdapat posyandu remaja yang memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, gizi, dan kebiasaan hidup sehat, sekaligus melakukan pengawasan kesehatan remaja secara berkala.

Selain posyandu, Desa Situsari juga menyelenggarakan posbindu untuk lansia, yang berperan penting dalam pemeriksaan kesehatan rutin, pemantauan tekanan darah, kadar gula, serta edukasi mengenai penyakit kronis dan pola hidup sehat pada usia lanjut. Program kelas ibu hamil juga rutin diadakan untuk memberikan informasi penting terkait kehamilan sehat dan persiapan persalinan. Tidak ketinggalan, penyuluhan kesehatan digelar untuk membahas isu-isu kesehatan masyarakat, seperti sanitasi, stunting, gizi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Keseluruhan program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Situsari, mendorong kesadaran hidup sehat, dan memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses secara merata oleh seluruh warga.

3.2.4. Program/Layanan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban

Program ini dilakukan oleh Desa Sirusari melalui kasi pemerintahan, yang bertugas untuk mengurus administrasi pemerintahan dan menjaga ketertiban wilayah. Layanan yang diberikan yaitu peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Desa Situsari yang berkoordinasi dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Babinsa, dan Bhabinkamtibnas untuk menjaga keamanan lingkungan, peningkatan peran Karang Taruna, serta mendorong partisipasi Masyarakat dalam kerja bakti. Program ini dilakukan untuk mengajak Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membangun lingkungan desa yang aman, tertib, dan kondusif bagi Masyarakat.

3.3. Profil Penerima Manfaat Program/Layanan Komunitas

Penerima manfaat dari program dan layanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Situsari Adalah seluruh Masyarakat desa sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Adapun rincian profil penerima manfaat berdasarkan program/layanan yang diberikan di Desa Situsari Kecamatan Darma

1. Penerima program/layanan administrasi kependudukan, layanan ini ditujukan untuk seluruh warga yang membutuhkan bantuan administrasi, seperti pengurusan dokumen kependudukan (KTP, KK, surat pindah domisili, dan dokumen lainnya), baik individu maupun keluarga. Masyarakat yang memanfaatkan layanan ini cenderung berasal dari kelompok usia produktif

hingga lanjut usia yang memelurkan dokumen resmi untuk berbagai keperluan seperti pekerjaan, Pendidikan, akses layanan sosial, atau perpindahan tempat tinggal.

2. Penerima program/layanan kesejahteraan, kelompok penerima manfaat utama pada layanan ini ditujukan bagi Masyarakat rentan dan kurang mampu. Mereka termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan sembako, dan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, layanan ini juga mencakup bantuan akses jaminan Kesehatan melalui program BPJS yang memberikan perlindungan Kesehatan bagi Masyarakat kurang mampu.
3. Penerima program/layanan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, layana ini ditujukan untuk melayani komunitas secara kolektif, khususnya pihak-pihak yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa, seperti linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Karang Taruna. Warga yang terlibat aktif dalam Pembangunan keamanan dan kenyamanan lingkungan, seperti pemuda, tokoh Masyarakat, dan anggota Linmas, merupakan penerima manfaat utama. Selain itu seluruh Masyarakat Desa Sitisari secara tidak langsung menjadi penerima manfaat karena program ini menghasilkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif untuk kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, penerima manfaat dari program dan layanan Desa Sitisari mencakup berbagai kelompok Masyarakat, mulai dari individu, keluarga, hingga komunitas local. Setiap program dirancang untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat secara menyeluruh, mulai dari administrasi dasar, kesejahteraan sosial, Kesehatan, keamanan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi.

BAB IV PELAKSANAAN INTERVENSI KOMUNITAS

4.1. Tahap Membangun Relasi (Dialog)

Tahap Persiapan Sosial (Social Preparation) merupakan langkah awal dalam praktik pekerjaan sosial makro yang berfokus pada pembentukan hubungan kerja serta pemahaman bersama antara praktikan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Pada tahap ini, praktikan melakukan proses pengenalan diri, penyampaian tujuan kegiatan, serta sosialisasi terkait 12 PAS dan PSKS. Langkah tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan, memperoleh dukungan, serta memastikan masyarakat memahami dan bersedia terlibat dalam setiap tahapan pemberdayaan komunitas yang akan dilaksanakan. Praktikan menerapkan teknik Community Meeting atau pertemuan dengan warga yang dilakukan baik secara formal maupun informal.

4.1.1. Proses Membangun Relasi

Tahap membangun relasi, praktikan terlebih dahulu melakukan silaturahmi dengan perangkat Desa Sitisari serta menyampaikan sosialisasi terkait 12 PAS/PPKS dan PSKS. Praktikan juga menerapkan strategi komunikasi secara formal maupun informal melalui kunjungan kepada tokoh-tokoh kunci masyarakat, termasuk aparat desa, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Selain itu, praktikan melakukan *Community Involvement* dengan terlibat langsung dalam berbagai aktivitas masyarakat maupun kelompok lokal.

Beragam teknik digunakan dalam proses ini, antara lain *transect walk*, *home visit*, serta diskusi informal untuk menghimpun informasi, membangun kepercayaan, dan memahami kebutuhan serta potensi yang dimiliki masyarakat. Tahapan membangun relasi tersebut berlangsung pada tanggal 27 Oktober hingga 2 November 2025 di Desa Sitisari. Adapun rincian aktivitas dan langkah-langkah yang dilaksanakan dapat dilihat pada uraian berikut.

1. Perkenalan diri dan penyampaian tujuan dan tahapan kegiatan praktikum di desa sitisari

Tahap ini dimulai ketika praktikan bersama dosen pembimbing melakukan kunjungan awal ke Balai Desa Sitisari pada tanggal 27 Oktober 2025, yang

dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai bentuk penerimaan resmi sebelum pelaksanaan praktikum dimulai. Pada kesempatan tersebut, praktikan memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan tujuan, fokus, serta orientasi kegiatan praktikum yang akan dilaksanakan di Desa Sitisari. Dosen pembimbing juga turut memberikan penjelasan terkait arah praktik yang berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pekerjaan sosial komunitas, sehingga diperlukan kolaborasi yang solid antara praktikan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga. Di sesi ini, praktikan juga meminta dukungan penuh serta partisipasi aktif dari perangkat desa, tokoh keagamaan, dan masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap asesmen, perencanaan, pelaksanaan program, hingga tahap terminasi, dengan harapan keterlibatan tersebut dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan kegiatan serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Sitisari



Foto 4.1. Perkenalan dengan kepala Desa Sitisari
Sumber: Dokumentasi praktikan

2. Silaturahmi kepada *stakeholder*

Praktikan memulai kegiatan praktikum komunitas dengan melakukan kunjungan langsung atau *home visit* ke rumah para tokoh masyarakat di Desa Sitisari, seperti perangkat desa, kepala dusun, ketua BPD, ketua PKK, ketua RT, serta tokoh agama yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial warga. Kegiatan *home visit* ini bertujuan untuk membangun komunikasi awal sekaligus menjalin hubungan yang baik antara praktikan dengan para tokoh kunci desa, sehingga tercipta pemahaman yang selaras mengenai arah praktikum yang akan dilaksanakan. Pada setiap kunjungan, praktikan memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan penyelenggaraan praktikum, serta memaparkan fokus kegiatan yang akan dijalankan selama berada di Desa Sitisari. Selain itu, praktikan juga menyampaikan permohonan dukungan dan partisipasi aktif dari

para tokoh tersebut agar seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari asesmen hingga terminasi, dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan yang kuat dari struktur masyarakat setempat. Melalui proses ini, terbentuklah relasi awal yang penting sebagai dasar kolaborasi dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan.



Foto 4.2. Perkenalan dengan *stakeholder* Desa Sitisari
Sumber: Dokumentasi praktikan

3. *Community Involvement*

Praktikan melakukan *community involvement* di Desa Sitisari sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam kehidupan sosial masyarakat guna membangun kedekatan, kepercayaan, serta pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi komunitas. Kegiatan yang diikuti praktikan meliputi pengajian rutin bersama warga yang menjadi sarana untuk memahami nilai-nilai keagamaan dan kultur sosial masyarakat Desa Sitisari. Selain itu, praktikan juga terlibat dalam kegiatan senam pagi bersama kader PKK yang dilaksanakan secara berkala, yang tidak hanya menjadi aktivitas menjaga kesehatan, tetapi juga memperkuat interaksi dan komunikasi dengan para ibu kader sebagai kelompok yang berperan penting dalam kegiatan desa. Praktikan juga turut hadir dalam kegiatan posyandu, baik posyandu balita maupun posyandu remaja, untuk mengamati alur pelayanan kesehatan dasar dan memahami kebutuhan masyarakat terkait kesehatan. Melalui berbagai bentuk partisipasi ini, praktikan dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan warga, memperoleh informasi yang relevan mengenai kondisi sosial masyarakat, serta menyiapkan dasar yang kuat dalam perencanaan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Berikut penjelasan kegiatan yang dilakukan oleh praktikan pada saat *Community Involvement*

- 1) Senam bersama ibu ibu PKK

Kegiatan senam bersama ibu-ibu kader PKK merupakan aktivitas rutin yang dilaksanakan setiap hari Sabtu sebagai upaya menjaga kebugaran dan mempererat kebersamaan warga. Praktikan terlibat secara aktif dalam kegiatan ini dengan mengikuti rangkaian senam bersama, membantu persiapan tempat, serta berinteraksi langsung dengan para peserta. Melalui keterlibatan tersebut, praktikan membangun kedekatan emosional dan komunikasi yang lebih cair dengan ibu-ibu PKK, sehingga tercipta hubungan yang akrab dan saling percaya. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi praktikan untuk mengenal dinamika sosial serta kebiasaan masyarakat Desa Situsari dalam menjalankan aktivitas kolektif.

2) Pengajian

Pengajian merupakan kegiatan rutin keagamaan yang diselenggarakan setiap malam Jumat di masjid Desa Situsari dan diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Praktikan turut hadir dan mengikuti kegiatan pengajian sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Kehadiran praktikan dalam kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghormati nilai-nilai keagamaan setempat, tetapi juga untuk memperkuat relasi sosial dengan warga. Melalui kegiatan pengajian, praktikan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai, norma, dan budaya religius yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Desa Situsari.

3) Posyandu

Kegiatan posyandu dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan sekali dengan sasaran ibu hamil, anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia. Praktikan berpartisipasi dalam kegiatan posyandu dengan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan serta berinteraksi dengan masyarakat yang hadir. Melalui keterlibatan ini, praktikan dapat mengamati secara langsung proses pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa serta peran aktif kader dalam mendukung kesehatan masyarakat. Kegiatan posyandu juga menjadi media bagi praktikan untuk memahami kebutuhan dan kondisi kesehatan masyarakat secara lebih komprehensif, sekaligus memperkuat kehadiran praktikan sebagai bagian dari komunitas Desa Situsari.

4. Sosialisasi tentang 12 PAS

Kegiatan sosialisasi 12 PAS bagi Pemerlu Layanan Atensi Sosial dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Oktober 2025 di Balai Desa Situsari, dan kegiatan ini menjadi rangkaian setelah pelantikan aparat desa. Sosialisasi tersebut

dihadiri oleh aparat desa serta warga Desa Sitisari yang turut berpartisipasi aktif dalam mendengarkan materi, berdiskusi, dan menyampaikan berbagai pertanyaan terkait layanan sosial. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya layanan atensi sosial, khususnya terkait 12 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang termasuk dalam cakupan 12 PAS. Materi sosialisasi mencakup penjelasan mengenai berbagai kelompok rentan seperti anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban bencana, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan kategori PPKS lainnya yang membutuhkan dukungan layanan sosial. Penjelasan tersebut diberikan untuk memastikan bahwa masyarakat dan aparat desa memahami karakteristik tiap kelompok serta bentuk intervensi yang dapat diberikan sesuai kebutuhan mereka.

Selain memberikan pemahaman mengenai kelompok sasaran, sosialisasi ini juga bertujuan memperkuat kapasitas aparat desa dan warga dalam mengenali, menjangkau, serta merujuk warga yang termasuk dalam kategori PPKS agar memperoleh penanganan yang tepat. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan penyelenggara layanan sosial dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan desa. Dengan bertambahnya wawasan dan kepekaan sosial masyarakat, kegiatan ini diharapkan mendorong terciptanya kesadaran kolektif bahwa penanganan PPKS bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kepedulian masyarakat. Pada akhirnya, sosialisasi 12 PAS ini diharapkan mampu membangun lingkungan sosial yang lebih responsif, inklusif, dan peduli terhadap warga yang menghadapi kerentanan sosial, sehingga kualitas kesejahteraan masyarakat Desa Sitisari dapat semakin meningkat.

4.1.2. Hasil Membangun Relasi

Tahap membangun relasi atau dialog yang dilakukan praktikan di Desa Sitisari menghasilkan berbagai capaian penting yang berkontribusi terhadap kelancaran proses praktikum. Serangkaian pendekatan interpersonal yang dijalankan terbukti efektif dalam membangun hubungan positif dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan antara praktikan dan para tokoh lokal, serta memperoleh informasi yang relevan terkait kondisi sosial desa. Hasil-hasil ini menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan intervensi selanjutnya dan

memperkuat kolaborasi antara praktikan, perangkat desa, serta kelompok masyarakat setempat. Adapun hasil dari pelaksanaan tahap membangun relasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan awal ke Balai Desa serta proses perkenalan diri membuat praktikan diterima dengan baik oleh kepala desa dan perangkat desa. Hubungan positif ini membuka ruang komunikasi yang lebih mudah dan membangun dasar kerja sama yang solid untuk pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan praktikum.
2. Home visit yang dilakukan kepada perangkat desa, ketua RT, ketua PKK, tokoh agama, dan tokoh pemuda berhasil memperoleh dukungan penuh dari para *stakeholder*. Mereka menyatakan kesediaan untuk terlibat dalam tahap asesmen hingga terminasi, sehingga memperkuat legitimasi dan kelancaran kegiatan praktikum di Desa Sitisari.
3. Partisipasi praktikan dalam kegiatan pengajian, senam PKK, serta posyandu membuat praktikan lebih dekat dengan warga. Interaksi ini mendorong tumbuhnya kepercayaan dan penerimaan masyarakat, sehingga memungkinkan proses asesmen dan komunikasi berjalan lebih efektif serta terbuka.
4. Melalui transect walk, diskusi informal, dan observasi lapangan, praktikan berhasil mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakat. Data ini menjadi dasar penting dalam merancang program pemberdayaan yang relevan dan sesuai dengan konteks kehidupan warga Desa Sitisari.
5. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat dan aparat desa memperoleh pemahaman lebih lengkap mengenai 12 jenis PPKS yang membutuhkan layanan atensi sosial. Pengetahuan ini memperkuat kapasitas desa dalam mengenali warga rentan, meningkatkan sensitivitas sosial, serta membuka peluang kolaborasi untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan sosial di lingkungan desa.

4.2. Tahap Asesmen (*Discovery*)

Asesmen merupakan tahapan penting yang dilakukan praktikan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan, potensi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya terkait isu-isu sosial yang muncul di Desa Sitisari. Proses ini mencakup asesmen awal yang berfokus pada pemetaan kondisi sosial,

permasalahan, serta potensi sumber daya yang tersedia, dan asesmen lanjutan yang bertujuan menggali lebih dalam fokus masalah yang akan ditangani selama kegiatan praktikum. Pelaksanaan asesmen berlangsung pada tanggal 5–12 November 2024 menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti *community meeting*, *Methodology Participatory Assessment (MPA)*, *Focus Group Discussion (FGD)*, wawancara, *home visit*, observasi, *transect walk*, studi dokumentasi, serta analisis masalah. Melalui kombinasi teknik tersebut, praktikan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika sosial masyarakat, kondisi objektif di lapangan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam kehidupan komunitas Desa Sitisari. Seluruh informasi yang terkumpul kemudian menjadi dasar dalam merumuskan arah perencanaan intervensi yang tepat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4.2.1. Proses Asesmen Awal

Tahap awal asesmen dilaksanakan pada tanggal 2 November di Balai Desa Sitisari dengan menggunakan teknik *Methodology Participatory Assessment (MPA)* dan *Sustainable Livelihood Asset (SLA)* sebagai upaya untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi sosial, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif ini, masyarakat diajak secara langsung untuk mengungkapkan pengalaman, tantangan, serta potensi yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari, sehingga data yang diperoleh mencerminkan situasi nyata yang dirasakan oleh warga. Proses asesmen awal ini juga berfungsi sebagai sarana membangun komunikasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan praktikum, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan terhadap program yang akan dirancang. Hasil temuan yang diperoleh kemudian menjadi dasar penting dalam menentukan fokus masalah yang paling mendesak untuk ditangani serta mengarahkan bentuk intervensi yang relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat Desa Sitisari.

1. Methodology Participatory Assessment

Methodology Participatory Assessment (MPA) merupakan pendekatan penggalan data yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, serta potensi yang ada di lingkungannya. Di Desa Sitisari, pendekatan ini dilakukan melalui diskusi kelompok, wawancara informal, dan pengamatan langsung terhadap kehidupan sehari-hari warga. Dengan cara ini,

masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, serta permasalahan yang mereka hadapi secara nyata dan apa adanya.

Melalui MPA, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Desa Situsari. Pendekatan ini membantu menggambarkan situasi lokal secara komprehensif karena informasi yang diperoleh berasal langsung dari warga. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengkajian mendorong munculnya kesadaran bersama terhadap kondisi desa serta potensi yang dapat dikembangkan secara mandiri.

2. *Sustainable Livelihood Asset*

Sustainable Livelihood Asset (SLA) digunakan untuk melihat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui pemanfaatan berbagai aset yang dimiliki. Di Desa Situsari, aset tersebut meliputi aset manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial. Masyarakat memiliki potensi berupa lahan pekarangan, keterampilan dasar, serta jaringan sosial yang cukup kuat, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam akses modal dan sarana pendukung.

Pendekatan SLA membantu memahami keterkaitan antaraset dalam mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat Desa Situsari. Ketika salah satu aset mengalami keterbatasan, aset lainnya dapat menjadi penopang untuk menjaga stabilitas penghidupan. Dengan memahami kondisi ini, masyarakat dapat lebih menyadari kekuatan yang dimiliki serta peluang untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

3. *Social Mapping*

Social Mapping merupakan proses pemetaan kondisi sosial yang bertujuan untuk mengetahui struktur masyarakat, hubungan antarwarga, serta sebaran potensi dan permasalahan di suatu wilayah. Di Desa Situsari, pemetaan sosial dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok masyarakat, tokoh-tokoh penting, fasilitas umum, serta wilayah yang memiliki peran strategis dalam aktivitas sosial dan ekonomi warga. Proses ini memberikan gambaran mengenai pola interaksi, tingkat partisipasi, serta peran masing-masing kelompok dalam kehidupan desa sehari-hari.

Hasil pemetaan sosial menunjukkan bagaimana hubungan sosial di Desa Situsari terbentuk dan bagaimana sumber daya tersebar di setiap wilayah. Informasi ini membantu memahami karakteristik masyarakat secara menyeluruh, termasuk wilayah yang memiliki potensi pengembangan dan wilayah yang masih

membutuhkan perhatian lebih. Selain itu, pemetaan sosial juga memperlihatkan jaringan sosial yang sudah berjalan, seperti peran kader PKK, tokoh agama, dan aparat desa dalam menggerakkan kegiatan masyarakat. Data yang diperoleh menjadi dasar untuk melihat peluang kolaborasi antarwarga serta mengidentifikasi kelompok sasaran yang tepat. Dengan pemetaan sosial yang jelas dan komprehensif, kondisi sosial Desa Sitisari dapat dipahami secara lebih sistematis, sehingga memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.



Foto 4.3. Pelaksanaan Asesmen Awal
Sumber: Dokumentasi praktikan

4.2.2. Hasil Asesmen Awal

Hasil asesmen yang dilakukan oleh praktikan menggunakan teknik *Methodology Participatory Assessment (MPA)* dan *Sustainable Livelihood Asset (SLA)* di Desa Sitisari memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki masyarakat. Melalui MPA, praktikan berhasil mengidentifikasi berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh warga, mulai dari tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, keterbatasan akses terhadap layanan sosial, hingga lemahnya kapasitas ekonomi kelompok tertentu seperti perempuan rawan sosial ekonomi. Sementara itu, melalui analisis SLA, diperoleh pemetaan yang lebih mendalam terkait lima aset penghidupan masyarakat, yaitu aset manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial, sehingga terlihat jelas kekuatan yang dapat diberdayakan maupun hambatan yang memerlukan intervensi. Kombinasi kedua teknik ini menghasilkan data yang komprehensif dan akurat, yang menunjukkan kondisi objektif desa serta memungkinkan praktikan menentukan fokus masalah dan strategi pemberdayaan yang paling sesuai. Hasil asesmen berdasarkan kedua teknik tersebut.

1. Methodology Participatory Assessment

Berdasarkan hasil asesmen awal yang dilakukan melalui pendekatan *Methodology Participatory Assessment* (MPA), diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan, permasalahan, serta harapan masyarakat Desa Sitisari. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dengan mendorong partisipasi aktif dalam mengungkapkan kondisi nyata yang mereka alami, khususnya terkait aspek sosial, ekonomi, dan potensi lokal. Melalui diskusi, wawancara, dan observasi partisipatif, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara langsung. Untuk memudahkan pemahaman dan analisis, hasil asesmen MPA tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 4.1. Hasil Pelaksanaan teknik *Methodology Participatory Assessment* (MPA)

No	Kategori Masalah	
1.	Perempuan Rentan	
2.	Fakir Miskin	
3.	Pendapatan Rendah	
4.	Disabilitas	
5.	Lansia	
6.	Stunting	
7.	Korban Bencana	
8.	Korban Kekerasan	
9.	Korban Napza	
10.	Narapidana	
11.	Anak Rentan	
No	Prioritas Masalah	Jumlah Suara
1.	Fakir Miskin	10
2.	Stunting	8
3.	Pendapatan Rendah	7
4.	Pendapatan Rentan	3
5.	Disabilitas	2
6.	Lansia	2
7.	Korban Kekerasan	2
8.	Korban Napza	2

9.	Korban Bencana	1
10.	Narapidana	1
11.	Anak Rentan	1
No	Kebutuhan	
1.	Pembentukan UMKM	
2.	Modal Usaha	
3.	Pemenuhan Gizi	
4.	Pelatihan Penanaman Sayuran	
5.	Penyuluhan Penanaman Sayuran	
6.	Penyuluhan Disabilitas	
7.	Penyuluhan Napza	
8.	Penyuluhan Siaga Bencana	
9.	Komunitas Peduli Lansia	
10.	Bantuan Korban Bencana	
11.	Komunitas Peduli Penyandang Disabilitas	
No	Potensi	Sumber
1.	SDA (Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan)	Pemerintah Desa
2.	Lamping Cariang Wisata	PKK
3.	UMKM Keripik Singkong	Bumbes
4.	Mata Air Situsari	Posyandu
5.	SDM (Bidan, Kyai/Ustadz, Kader PKK)	Tokoh Masyarakat

Sumber: Asesmen menggunakan *Methodology Participatory Assessment* (MPA)

2. Sustainable Livelihood Asset (SLA)

Berdasarkan hasil asesmen awal yang dilakukan melalui pendekatan *Sustainable Livelihood Asset* (SLA), diperoleh gambaran komprehensif mengenai aset penghidupan masyarakat Desa Situsari yang mencakup aset manusia, aset sosial, aset alam, aset fisik, dan aset finansial. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki masyarakat sekaligus keterbatasan yang dihadapi dalam mempertahankan dan meningkatkan keberlanjutan penghidupan mereka. Melalui pemetaan aset manusia, diketahui tingkat keterampilan, pengetahuan, serta kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Aset sosial menggambarkan kuatnya jaringan sosial, gotong royong, dan peran kelembagaan lokal yang mendukung kehidupan bermasyarakat. Sementara

itu, aset alam dan fisik menunjukkan ketersediaan lahan, sumber daya lingkungan, serta sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan, dan aset finansial memberikan gambaran mengenai kemampuan ekonomi serta akses masyarakat terhadap sumber permodalan. Dengan pemahaman ini, potensi dan kebutuhan masyarakat Desa Sitisari dapat dianalisis secara lebih terarah dan berkelanjutan., hasil asesmen SLA disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2. Hasil pelaksanaan *Sustainable Livelihood Asset (SLA)*

No.	Modal Fisik	Modal Alam	Modal Finansial	Modal Manusia	Modal Sosial
1.	Pesantren	Sumber Mata Air	BUMNDES	Ustad	Karang Taruna
2.	Sekolah SD	Persawahan	Dana Desa	Guru	Posyandu
3.	Balai Desa	Perkebunan	Retribusi Air	Kader PKK	Posbindu
4.	Lapangan			Lindas	Kerja Bakti
5.	PAUD			TNI	Siskamling
6.	Poskesdes				
7.	Pos Ronda				

Sumber: Asesmen menggunakan *Sustainable Livelihood Asset (SLA)*

3. Social Mapping

Berdasarkan hasil asesmen awal yang dilakukan melalui pendekatan *Social Mapping*, diperoleh data dan informasi awal mengenai karakteristik wilayah Desa Sitisari, baik dari aspek geografis, demografis, maupun sosiografis. Pemetaan ini memberikan gambaran tentang kondisi wilayah, jumlah dan komposisi penduduk, serta pola hubungan sosial dan peran kelembagaan yang berkembang di masyarakat. hasil asesmen social mapping disajikan dalam tabel berikut.



Gambar 4.1. *Social Mapping* Desa Sitisari
Sumber: Dokumentasi praktikan

4.2.3. Proses Asesmen Lanjutan

Setelah melaksanakan asesmen awal dan memperoleh gambaran umum mengenai kondisi sosial masyarakat, para praktikan kemudian menentukan fokus masalah yang akan menjadi prioritas dalam program pemberdayaan. Dari berbagai temuan asesmen tersebut, praktikan memilih Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebagai fokus utama intervensi, mengingat jumlah PRSE di Desa Situsari cukup tinggi dan mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang masih berada di bawah standar kesejahteraan. Pemilihan fokus ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok PRSE memiliki tingkat kerentanan yang lebih besar, baik dari aspek ekonomi, akses terhadap sumber daya, maupun peluang peningkatan kapasitas diri. Praktikan melanjutkan ke tahap asesmen lanjutan untuk menggali lebih dalam kebutuhan, hambatan, serta potensi yang dimiliki kelompok PRSE sebagai dasar dalam merancang program pemberdayaan yang tepat sasaran. Teknik yang dilakukan oleh praktikan dalam asesmen yaitu:

1. Wawancara

Praktikan memulai langkah asesmen lanjutan dengan melakukan wawancara mendalam bersama Ketua RT 01 sebagai informan kunci. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang berada di wilayah RT 01, sekaligus menggali informasi terkait kondisi sosial ekonomi mereka secara umum. Melalui percakapan ini, praktikan mendapatkan gambaran mengenai tingkat kerentanan, sumber penghasilan, serta kebutuhan yang paling mendesak dari para PRSE. Kegiatan wawancara dilakukan secara langsung di rumah Ketua RT, sehingga memungkinkan diskusi yang lebih terbuka dan mendalam mengenai situasi nyata yang dihadapi kelompok sasaran.



Foto 4.4. Wawancara dengan ketua RT 01
Sumber: Dokumentasi praktikan

Setelah melakukan wawancara awal dengan Ketua RT 01 untuk memperoleh gambaran umum kondisi lingkungan dan sosial masyarakat, praktikan melanjutkan penggalan data melalui wawancara langsung kepada perempuan rawan sosial ekonomi dengan melakukan kegiatan *home visit*. Kunjungan ke rumah ini bertujuan untuk memahami kondisi kehidupan sehari-hari secara lebih mendalam, meliputi aspek ekonomi keluarga, aktivitas yang dilakukan di rumah, serta potensi dan kebutuhan yang dimiliki. Melalui pendekatan ini, praktikan juga dapat membangun komunikasi yang lebih dekat dan suasana yang nyaman, sehingga responden lebih terbuka dalam menyampaikan pengalaman, permasalahan, dan harapan mereka.

2. Home Visit

Setelah memperoleh informasi mengenai jumlah serta kondisi umum PRSE di RT 01, praktikan kemudian melaksanakan asesmen lanjutan melalui kegiatan *home visit* ke rumah-rumah PRSE. Kunjungan ini dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi sosial ekonomi para penerima, sekaligus menggali informasi lebih mendalam terkait permasalahan, kebutuhan, dan tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses *home visit* tersebut, praktikan juga mengidentifikasi berbagai bentuk bantuan yang sebelumnya telah diterima oleh PRSE, baik dari pemerintah desa maupun program bantuan lainnya, guna mengetahui sejauh mana dukungan telah diberikan dan aspek mana yang masih memerlukan perhatian. Melalui pendekatan ini, praktikan mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif sebagai landasan dalam merancang program pemberdayaan yang tepat sasaran.



Foto 4.5. *Home Visit* ke rumah PRSE
Sumber: Dokumentasi praktikan

3. Analisis Masalah

Setelah seluruh data diperoleh melalui wawancara, diskusi, serta kegiatan home visit, praktikan kemudian melakukan analisis mendalam terhadap informasi yang terkumpul. Proses analisis ini dilakukan dengan menelaah berbagai faktor penyebab dan dampak yang muncul dari permasalahan yang dialami oleh PRSE, sehingga pola kerentanan dan kebutuhan yang paling mendesak dapat teridentifikasi secara jelas. Melalui langkah ini, praktikan mampu memahami hubungan antara kondisi sosial ekonomi, akses terhadap sumber daya, serta hambatan yang dihadapi oleh PRSE dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan intervensi yang relevan, tepat sasaran, dan sesuai dengan konteks permasalahan yang terjadi di lapangan.

4.2.4. Hasil Asesmen Lanjutan

Berdasarkan hasil asesmen lanjutan dan analisis masalah yang dilakukan melalui wawancara mendalam, *home visit*, serta diskusi dengan tokoh lingkungan, diketahui bahwa sasaran program, yaitu perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE), berada pada kondisi ekonomi rumah tangga yang rentan. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang dimiliki berada pada kisaran Rp500.000–Rp1.000.000 per bulan, yang bersumber dari pekerjaan tidak tetap seperti buruh harian lepas, pekerjaan serabutan, atau bantuan keluarga. Sebagian besar sasaran tidak memiliki penghasilan tetap dan menjadi penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sehingga berada dalam kondisi kerentanan ekonomi yang cukup tinggi.

Lebih lanjut, melalui asesmen lanjutan dan analisis masalah, ditemukan bahwa hambatan yang dihadapi sasaran tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dari sisi struktural, analisis masalah menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap modal usaha, keterbatasan lahan pekarangan, serta minimnya keterampilan produktif yang dapat dikembangkan.

1. Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama Ketua RT 01 sebagai informan kunci, diperoleh sejumlah temuan penting terkait kondisi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di wilayah tersebut, yaitu:

- 1) Jumlah PRSE di RT 01 cukup tinggi

- 2) Sebagian besar PRSE memiliki penghasilan tidak tetap dan berada di bawah standar kelayakan ekonomi.
- 3) Mayoritas PRSE bekerja serabutan seperti buruh tani atau pekerjaan domestik dengan upah rendah.
- 4) Terdapat PRSE yang menjadi kepala keluarga dan tidak mendapat dukungan pasangan.
- 5) Kebutuhan mendesak yang muncul adalah peningkatan keterampilan dan peluang usaha rumahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT 01 praktikan mendapatkan data jumlah PRSE yang ada di RT 01, berikut rinciannya:

Tabel 4.3. Data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di RT 01

No.	Nama	Umur
1.	Nuri	30 Tahun
2.	Nia	36 Tahun
3.	Nesa	55 Tahun
4.	Icih	57 Tahun
5.	Kunuh	54 Tahun
6.	Cicik	54 Tahun
7.	Odah	48 Tahun
8.	Eem	55 Tahun
9.	Inih	51 Tahun
10.	Rus	43 Tahun
11.	Nani	47 Tahun
12.	Elih	43 Tahun

Sumber: Wawancara dengan ketua RT 01

2. *Home visit*

Melalui kegiatan home visit yang dilakukan ke rumah-rumah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), praktikan memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi kehidupan sehari-hari para sasaran, dengan temuan sebagai berikut:

- 1) Kondisi hunian PRSE umumnya sederhana dan membutuhkan perbaikan fisik dasar.
- 2) Banyak PRSE tidak memiliki aset produktif yang dapat menunjang peningkatan penghasilan.
- 3) Ditemukan kesulitan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga akibat pendapatan yang tidak stabil.
- 4) Beberapa PRSE pernah menerima bantuan sosial, namun sifatnya tidak berkelanjutan.

5) Terdapat minat besar dari PRSE untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang dapat menghasilkan pendapatan.

3. Analisis Masalah

Melalui analisis data dari wawancara, diskusi, dan home visit, teridentifikasi beberapa kebutuhan utama PRSE yang menjadi dasar dalam merumuskan intervensi, yaitu:

- 1) Kebutuhan peningkatan keterampilan produktif yang dapat dikerjakan dari rumah.
- 2) Akses terhadap modal usaha kecil untuk memulai kegiatan ekonomi.
- 3) Kebutuhan akan pendampingan intensif untuk mengembangkan kemampuan baru secara konsisten.
- 4) Perlunya dukungan emosional dan sosial untuk meningkatkan kepercayaan diri PRSE.
- 5) Kegiatan pemberdayaan yang fleksibel dan memungkinkan diikuti tanpa mengganggu tugas domestik.

4.3. Tahap Rencana Intervensi (*Discovery*)

4.3.1. Proses Rencana Intervensi

Berdasarkan hasil asesmen lanjutan yang dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan *home visit*, praktikan melanjutkan pada tahap penyusunan rencana kegiatan dengan menggunakan teknik *Technology of Participation (ToP)*. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses perencanaan benar-benar melibatkan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di RT 01 Desa Situsari sebagai subjek utama, bukan sekadar penerima program. Dalam proses ini, delapan orang peserta diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta harapan mereka terkait upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Praktikan berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan diskusi agar tetap fokus dan terstruktur, sekaligus memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Melalui dialog terbuka, peserta bersama-sama mengidentifikasi permasalahan utama yang selama ini mereka hadapi dalam aspek ekonomi dan pengelolaan waktu domestik. Proses ini juga memperkuat rasa saling percaya dan kebersamaan antaranggota kelompok.

Pada tahap selanjutnya, peserta diajak untuk merumuskan prioritas kebutuhan dan menentukan bentuk kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi serta kemampuan mereka. Diskusi difokuskan pada pemilihan kegiatan yang realistis, mudah diterapkan, dan memiliki manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Praktikan membantu peserta dalam menimbang berbagai alternatif kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, waktu, serta dukungan lingkungan sekitar. Dari hasil proses partisipatif tersebut, peserta secara kolektif menyepakati jenis kegiatan yang dinilai paling relevan dan berpotensi memberikan dampak positif. Kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan. Dengan keterlibatan aktif sejak tahap perencanaan, diharapkan kegiatan yang disusun dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan PRSE di Desa Sitisari. Berikut adalah uraian kegiatannya:

1. Praktikan membuka kegiatan dan menjelaskan pengertian *Technology of Participation (ToP)*, serta menjelaskan tujuan kegiatan yang sedang dilaksanakan
2. Praktikan mulai menanyakan kebutuhan dan kegiatan apa yang ingin mereka jalankan sebagai pemenuhan kebutuhan mereka, tujuan, tanggal pelaksanaan program
3. Pembuatan Tim Kerja Masyarakat untuk memaksimalkan dan memastikan keberlanjutan program
4. Melakukan janji hati untuk mengikat komitmen TKM dan anggota dalam program pemberdayaan



Foto 4.6. Pelaksanaan Proses Rencana Intervensi
Sumber: Dokumentasi praktikan

4.3.2. Hasil Rencana Intervensi

Setelah menyusun rencana kegiatan menggunakan teknik *Technology of Participation (ToP)*, diperoleh kesepakatan bersama mengenai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di RT 01 Desa Sitisari. Hasil perencanaan menunjukkan bahwa kegiatan yang dipilih berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rencana kegiatan disusun secara bertahap, dimulai dari pemberian pemahaman dasar, pelatihan praktik, hingga pendampingan lanjutan. Setiap peserta memahami peran dan keterlibatan yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya kesepakatan ini, rencana kegiatan memiliki arah yang jelas dan mendapat dukungan dari seluruh peserta. berikut hasil dari menyusun rencana intervensi:

1. Nama Program

Sitisari Perempuan Berkebun (SARIMBA)

2. Tujuan Program

Tujuan Umum

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat Desa Sitisari melalui kegiatan berkebun sayuran menggunakan media polybag, sehingga mampu memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif untuk mendukung ketahanan pangan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup.

Tujuan Khusus

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai teknik dasar budidaya sayuran menggunakan media polybag yang mudah diterapkan di lingkungan rumah.
- 2) Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menyiapkan media tanam, melakukan penanaman, perawatan, hingga panen sayuran secara mandiri.
- 3) Mendorong pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif yang sehat, murah, dan berkelanjutan.
- 4) Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui praktik berkebun yang ramah lingkungan.
- 5) Memperkuat kebersamaan dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan kelompok yang bersifat edukatif dan produktif.

6) Membuka peluang pengembangan kegiatan berkebun sebagai aktivitas penunjang ekonomi keluarga dalam jangka panjang.

3. Sasaran Program

Target sasaran program ini yaitu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ada di rt 01 desa Situsari Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan

4. Jenis Kegiatan

Praktikan kemudian merangkum hasil penyusunan rencana kegiatan menggunakan teknik *Technology of Participation (ToP)* ke dalam bentuk tabel. Penyajian dalam tabel ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap tahapan kegiatan, tujuan, serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu, tabel tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara sistematis dan terarah. Dengan adanya tabel perencanaan ini, proses pelaksanaan kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi dengan lebih mudah. sebagai berikut:

Tabel 4.4. Hasil Pelaksanaan Rencana Intervensi

Nama Program SARIMBA (Situsari Perempuan Berkebun)					
No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Waktu	Sasaran Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1.	Penyuluhan mengenai cara budidaya tanaman	Memberikan pemahaman dasar kepada peserta mengenai konsep budidaya tanaman yang baik dan benar. Meningkatkan wawasan peserta terkait pemilihan bibit, pengolahan media tanam, penyiraman, serta perawatan tanaman.	21 November 2025	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi RT 01	Masyarakat memahami fungsi bibit, media tanam, pupuk, dan teknik perawatan tanaman.
2.	Pelatihan penanaman menggunakan media tanam polybag	Memberikan keterampilan teknis kepada Masyarakat tentang cara menyiapkan	21 November 2025	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi RT 01	Masyarakat mampu menyiapkan polybag, tanah, pupuk, dan bibit

		media tanam dalam polybag. Melatih Masyarakat agar mampu melakukan penanaman bibit sayuran secara mandiri menggunakan polybag.			sesuai langkah pelatihan.
3.	Praktik penanaman sayuran	Memberikan pengalaman praktik nyata sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi melalui budidaya sayuran.	21 November 2025	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi RT 01	Peserta mampu melakukan proses penanaman secara mandiri mulai dari penyiapan media hingga penanaman bibit.

Sumber: Pelaksanaan menyusun rencana intervensi menggunakan ToP

5. Tim Kerja Masyarakat

Setelah menyusun rencana intervensi berupa kegiatan kegiatan diatas, praktikan juga menyusun Tim Kerja Masyarakat yang sudah di sepakati bersama, berikut Tim Kerja Masyarakat dalam program SARIMBA

- 1) Ketua : Cicih
- 2) Sekretaris : Nisa
- 3) Bendahara : Eem

6. Indikator Keberhasilan

Sebagai tolak ukur dalam menilai ketercapaian tujuan program yang telah dilaksanakan, indikator keberhasilan disusun secara jelas dan terukur agar hasil program dapat dievaluasi secara objektif. Indikator ini berfungsi untuk menggambarkan tingkat efektivitas kegiatan yang telah dijalankan serta perubahan yang terjadi pada target sasaran. Penilaian keberhasilan tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari proses dan hasil yang dirasakan oleh peserta. Aspek partisipasi menjadi salah satu indikator utama, khususnya keterlibatan aktif PRSE dalam setiap tahapan kegiatan. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam budidaya sayuran juga menjadi ukuran penting keberhasilan program. Indikator keberhasilan ini

diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak program serta menjadi dasar evaluasi dan pengembangan kegiatan selanjutnya. Berikut indikator keberhasilan yang sudah di susun oleh praktikan:

- 1) Peserta hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyuluhan, pelatihan, hingga praktik penanaman sayuran di polybag dengan tingkat kehadiran yang konsisten.
- 2) Peserta mampu memahami materi budidaya sayuran di polybag, yang ditunjukkan melalui kemampuan menjelaskan kembali tahapan penanaman, perawatan, dan pemanenan.
- 3) Peserta mampu mempraktikkan secara langsung proses menyiapkan media tanam, melakukan penanaman, serta merawat tanaman secara mandiri.
- 4) Tanaman sayuran yang ditanam menunjukkan pertumbuhan yang baik
- 5) Peserta tetap melakukan perawatan tanaman dan berencana melanjutkan kegiatan berkebun meskipun program telah selesai.



Foto 4.7. Pelaksanaan *Teknik Technology of Participation (ToP)*
Sumber: Dokumentasi praktikan

4.4. Tahap Intervensi (Development)

4.4.1 Bentuk Kegiatan Intervensi

Setelah menyusun rencana intervensi menggunakan teknik *Technology of Participation (ToP)*, beberapa kegiatan yang dilaksanakan praktikan sebagai berikut:

1. Penyuluhan mengenai cara budidaya sayuran
 - 1) Proses Penyuluhan mengenai budidaya sayuran

Penyuluhan Program Sitisari Perempuan Berkebun (SARIMBA) dilaksanakan pada 21 November 2025 di kediaman Ketua RT 01 Desa Sitisari. Kegiatan ini ditujukan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebagai

sasaran utama program, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas mereka dalam praktik budidaya tanaman sayuran. Kehadiran Ketua RT 01 sebagai *interest group* turut memberikan dukungan moral serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Acara penyuluhan dibuka oleh mahasiswa praktikan yang memberikan pengantar mengenai maksud, tujuan, dan alur kegiatan. Pengantar ini berfungsi membangun pemahaman awal para target sasaran terkait pentingnya keterampilan bercocok tanam sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi keluarga. Setelah sesi pembukaan, materi inti penyuluhan disampaikan oleh Pak Ahlan, penyuluh dari Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Darma, yang memiliki keahlian dalam teknik bercocok tanam serta pengembangan pertanian rumah tangga. Untuk memperlancar kegiatan, beliau didampingi oleh Ibu Maya sebagai pendamping penyuluhan.

Seluruh penjelasan yang diberikan oleh narasumber kemudian dirangkum oleh praktikan untuk memastikan materi dapat dipahami dan didokumentasikan secara sistematis. Rangkuman tersebut selanjutnya dibagi ke dalam tiga bagian utama agar lebih mudah dipelajari oleh peserta maupun digunakan sebagai bahan evaluasi program, yaitu:

- (1) Cara pembuatan pupuk menggunakan media kotoran kambing
- (2) Cara menanam sayuran menggunakan media polybag
- (3) Cara menghadapi tanaman yang terkena hama

Sepanjang sesi penyuluhan, suasana berlangsung sangat interaktif. Para target sasaran menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif mengajukan pertanyaan kepada penyuluh terkait berbagai permasalahan dalam budidaya tanaman. Penyuluh juga memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta. Interaksi dua arah yang tercipta membuat jalannya penyuluhan menjadi dinamis, menyenangkan, dan efektif dalam menyampaikan pesan edukatif.

Pada akhir sesi, setelah penyampaian materi terkait penanganan tanaman yang terserang hama, penyuluh membagikan lembar informasi yang memuat ringkasan materi kegiatan. Lembar ini berfungsi sebagai media pengingat bagi para ibu mengenai tahapan perawatan tanaman yang benar. Selain itu, bahan tertulis tersebut dapat digunakan sebagai panduan praktis yang dapat dibaca

kembali saat melakukan penanaman secara mandiri di rumah. Dengan adanya panduan ini, peserta diharapkan lebih mudah mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam kegiatan bercocok tanam sehari-hari. Pembagian lembar informasi juga menjadi upaya untuk memastikan keberlanjutan pengetahuan setelah kegiatan selesai. Materi tertulis ini membantu peserta yang mungkin lupa dengan penjelasan lisan selama penyuluhan. Selain itu, lembar informasi dapat dibagikan kepada anggota keluarga lain sehingga manfaat pengetahuan dapat menyebar lebih luas. Hal ini turut mendukung upaya peningkatan kapasitas keluarga secara berkelanjutan.



Foto 4.8. Pelaksanaan Penyuluhan
Sumber: Dokumentasi praktikan

2) Hasil Penyuluhan mengenai budidaya sayuran

Hasil dari kegiatan penyuluhan Program Sitisari Perempuan Berkebun (SARIMBA) menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terkait budidaya tanaman sayuran. Para PRSE yang sebelumnya belum memiliki pengetahuan dasar mengenai teknik bercocok tanam, setelah mengikuti penyuluhan mampu memahami tahapan pembuatan pupuk organik dari kotoran kambing, teknik penanaman sayuran menggunakan media polybag, serta cara mengatasi tanaman yang terserang hama. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang disampaikan serta respons aktif selama sesi tanya jawab.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan penyuluhan juga berhasil menumbuhkan minat dan motivasi peserta untuk mulai memanfaatkan pekarangan rumah sebagai media bercocok tanam. Antusiasme peserta tercermin dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait jenis tanaman yang sesuai, perawatan harian, serta kemungkinan pemanfaatan hasil panen. Dukungan Ketua RT 01 dan kehadiran penyuluh pertanian turut memperkuat kepercayaan peserta

terhadap materi yang disampaikan, sehingga penyuluhan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga mendorong kesiapan peserta untuk melanjutkan ke tahap pelatihan dan praktik penanaman.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan SARIMBA berhasil menjadi landasan awal dalam proses pemberdayaan, karena mampu meningkatkan kapasitas kognitif peserta serta membangun kesadaran akan potensi pekarangan rumah sebagai aset produktif. Hasil penyuluhan ini menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan berupa pelatihan dan praktik budidaya sayuran, sekaligus memperkuat keberlanjutan program di Desa Sitisari.

2. Pelatihan cara menanam sayuran

1) Proses Pelatihan cara menanam sayuran

Setelah penyampaian materi pada sesi penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan praktik yang dipandu langsung oleh Pak Ahlan selaku penyuluh. Pada tahap awal, target sasaran diperkenalkan pada proses pembuatan media tanam dengan mencampurkan pupuk organik, arang sekam, dan tanah. Penyuluh menjelaskan fungsi masing-masing bahan, mulai dari peran pupuk organik dalam menyediakan nutrisi, arang sekam yang membantu menjaga aerasi dan porositas media, hingga tanah sebagai komponen utama yang menjadi tempat tumbuhnya akar. Proses pencampuran ini dilakukan secara bertahap agar peserta dapat memahami tekstur, komposisi, dan proporsinya secara tepat. Setelah media tanam selesai diolah, target sasaran melanjutkan praktik penanaman sayuran menggunakan polybag. Mereka diajarkan cara mengisi polybag, membuat lubang tanam yang sesuai, serta menempatkan bibit dengan posisi dan kedalaman yang dianjurkan. Pendekatan praktik langsung ini memberikan pengalaman yang konkret bagi para ibu sehingga memudahkan mereka mempelajari tahapan dasar dalam budidaya tanaman.

Di sela-sela proses pelatihan, penyuluh turut memberikan materi tambahan mengenai teknik penanaman beberapa jenis bibit sayuran seperti kangkung, timun, dan seledri. Penjelasan ini mencakup perbedaan karakteristik masing-masing tanaman, kebutuhan air, intensitas cahaya, dan jarak tanam yang ideal. Peserta mendapat pemahaman bahwa setiap jenis bibit memerlukan perlakuan yang berbeda agar dapat tumbuh dengan optimal. Melalui penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami, para ibu semakin memahami pentingnya

memperhatikan kebutuhan spesifik tanaman agar hasil budidaya lebih maksimal. Dengan adanya kombinasi penyuluhan teoritis dan pelatihan praktik, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membantu mereka memperoleh keterampilan langsung yang dapat diterapkan saat melakukan penanaman di lingkungan rumah mereka.

2) Hasil pelatihan cara menanam sayuran

Hasil pelatihan praktik menunjukkan bahwa target sasaran mampu memahami dan mempraktikkan secara langsung tahapan dasar budidaya sayuran menggunakan media polybag. Target sasaran berhasil mengolah media tanam dengan komposisi yang tepat, yaitu campuran pupuk organik, arang sekam, dan tanah, serta memahami fungsi masing-masing bahan dalam menunjang pertumbuhan tanaman. Pemahaman ini terlihat dari kemampuan peserta membedakan tekstur media yang baik dan kesiapan mereka menyiapkan media tanam secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada pendamping.

Selain itu, peserta mampu menerapkan teknik penanaman bibit dengan benar, mulai dari pengisian polybag, pembuatan lubang tanam, hingga penempatan bibit sesuai kedalaman dan posisi yang dianjurkan. Pengetahuan tambahan mengenai perbedaan karakteristik tanaman kangkung, timun, dan seledri turut meningkatkan pemahaman peserta bahwa setiap jenis tanaman membutuhkan perlakuan yang berbeda, terutama dalam hal penyiraman, pencahayaan, dan jarak tanam. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan peserta dalam budidaya sayuran rumah tangga.



Foto 4.9. Pelatihan Budidaya Sayuran
Sumber: Dokumentasi praktikan

3. Praktik menanam sayuran

1) Proses praktik menanam sayuran

Sesi selanjutnya setelah kegiatan penyuluhan dan pelatihan adalah praktik penanaman skala besar yang dilakukan langsung oleh target sasaran. Pada tahap ini, para peserta mencoba menanam dengan jumlah media tanam yang lebih banyak, yaitu sekitar 60 hingga 70 polybag. Praktikan mendampingi kegiatan tersebut secara penuh untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan benar sesuai materi yang telah diberikan sebelumnya. Peserta diajak membuat campuran media tanam secara mandiri menggunakan pupuk organik, arang sekam, dan tanah, sambil dibimbing untuk memahami komposisi yang tepat agar media menjadi gembur dan kaya nutrisi. Praktikan turut membantu proses pencampuran untuk memastikan semua bahan teraduk merata dan siap digunakan sebagai media penanaman.

Setelah proses persiapan media tanam selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman benih sayuran yang telah disiapkan, yaitu bibit timun dan kangkung. Para ibu mempraktikkan langsung cara mengisi polybag, membuat lubang tanam, dan menempatkan bibit sesuai teknik yang telah dipelajari pada sesi sebelumnya. Praktikan terus memberikan arahan selama proses berjalan untuk memastikan peserta memahami cara menanam yang benar, mulai dari kedalaman tanam, jarak antar bibit, hingga cara menyiram awal agar bibit dapat beradaptasi dengan media yang baru. Melalui praktik penanaman skala besar ini, para peserta tidak hanya memperkuat keterampilan yang telah mereka pelajari, tetapi juga membangun kepercayaan diri untuk menerapkannya secara mandiri di lingkungan rumah masing-masing.



Foto 4.10. Praktik menanam sayuran
Sumber: Dokumentasi praktikan

2) Hasil praktik menanam sayuran

Hasil dari kegiatan praktik penanaman skala besar menunjukkan bahwa target sasaran mampu mengaplikasikan materi penyuluhan dan pelatihan ke

dalam praktik nyata secara mandiri. Peserta berhasil melakukan proses penanaman menggunakan 60–70 polybag yang telah disiapkan, mulai dari pencampuran media tanam hingga penanaman bibit sayuran. Media tanam yang digunakan telah memenuhi komposisi yang dianjurkan, yaitu campuran tanah, pupuk organik, dan arang sekam, sehingga menghasilkan media yang gembur dan layak untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan teknis peserta dalam menyiapkan media tanam yang baik dan benar.

Selain itu, peserta mampu menerapkan teknik penanaman bibit timun dan kangkung sesuai dengan arahan yang diberikan, seperti pengisian polybag, pembuatan lubang tanam, penempatan bibit, serta penyiraman awal. Kesalahan-kesalahan dasar yang sebelumnya sering terjadi, seperti kedalaman tanam yang tidak sesuai atau penyiraman berlebihan, mulai dapat diminimalisir melalui pendampingan langsung. Partisipasi aktif peserta selama praktik juga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengikuti instruksi, tetapi mulai memahami alasan di balik setiap tahapan penanaman.

Secara keseluruhan, praktik penanaman skala besar ini berhasil meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam melakukan budidaya sayuran secara mandiri di pekarangan rumah. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa proses peningkatan kapasitas tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi telah berkembang ke tahap keterampilan aplikatif. Hasil praktik ini sekaligus menjadi dasar kesiapan peserta untuk melanjutkan perawatan tanaman secara berkelanjutan serta mengembangkan kegiatan berkebun sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.

4.5. Tahap Evaluasi (Development)

Pelaksanaan tahap evaluasi Program Sitisari Perempuan Berkebun dilakukan pada tanggal 6 November 2025. Evaluasi ini merupakan penilaian menyeluruh terhadap hasil beberapa tahapan program, mulai dari asesmen awal hingga pelaksanaan intervensi, dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan proses intervensi yang telah dijalankan oleh praktikan. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan bersama Tim Kelompok Masyarakat (TKM) dan bertempat di kediaman Ketua TKM.

Acara evaluasi dihadiri oleh pengurus TKM, yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, yang turut memberikan masukan dan tanggapan terhadap jalannya

program. Kehadiran seluruh pengurus TKM memungkinkan praktikan memperoleh penilaian yang komprehensif serta mendapatkan umpan balik langsung mengenai efektivitas intervensi, partisipasi sasaran, serta hasil yang dicapai.

4.5.1. Evaluasi Proses

Pada tanggal 7 Desember 2025, praktikan bersama Tim Kerja Masyarakat (TKM) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sitisari Perempuan Berkebun di Desa Sitisari. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana setiap tahapan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana intervensi yang telah disepakati antara praktikan dan TKM. Selain itu, evaluasi juga difokuskan pada pemeriksaan kesesuaian program dengan kebutuhan target sasaran, memastikan program berjalan secara partisipatif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di desa tersebut.

Dalam proses evaluasi, praktikan menerapkan pendekatan partisipatif dengan memfasilitasi diskusi terbuka antara anggota TKM dan masyarakat, sehingga semua pihak dapat memberikan masukan serta menilai jalannya kegiatan. Praktikan juga menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data mengenai efektivitas pelaksanaan setiap tahapan intervensi, termasuk kendala dan kemajuan yang terjadi. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian program, efektivitas pelaksanaan, serta area yang masih memerlukan perbaikan. Berikut ini adalah hasil diskusi dan temuan dari evaluasi proses yang telah dilakukan antara praktikan dan TKM.

Tabel 4.5. Evaluasi Proses

No.	Kegiatan	Evaluasi
1.	Asesmen awal	Hasil asesmen awal di Desa Sitisari menunjukkan bahwa perempuan di desa memiliki potensi dan minat untuk melakukan kegiatan produktif, namun masih terkendala oleh keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan lahan pekarangan.
2.	Asesmen Lanjutan	Target sasaran menunjukkan keterbukaan ketika praktikan melakukan asesmen lanjutan, membuat praktikan dengan mudah memetakan nya

3.	Rencana Intervensi	Pada saat menyusun rencana intervensi menggunakan teknik ToP, sasaran target aktif terlibat dalam kegiatan dengan memberi saran kegiatan intervensi
4.	Intervensi	<p>Penyuluhan: ketika penyuluhan target sasaran sangat aktif bertanya kepada penyuluh, selain itu penjelasan yang diberikan oleh penyuluh mudah dipahami oleh target sasaran</p> <p>Pelatihan: pada saat pelatihan juga penyuluh mengajarkan setiap langkah secara detail tidak lupa menjelaskan langkah langkah dari mulai membuat pupuk hingga penanaman benih</p> <p>Praktik: ketika melakukan praktik langsung target sasaran terlihat sudah mengerti dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh penyuluh sehingga saat praktik langsung tidak banyak bertanya kepada praktikan</p>
5.	Evaluasi	Tahap evaluasi berjalan kondusif, di mana praktikan dan Tim Kerja Masyarakat (TKM) berdiskusi secara terbuka mengenai jalannya intervensi. Dalam proses ini, keduanya saling bertukar pikiran untuk mengidentifikasi kekurangan yang muncul selama kegiatan berlangsung. Suasana evaluasi yang hangat dan partisipatif membantu menggali masukan yang konstruktif, sehingga setiap catatan yang muncul dapat dijadikan dasar untuk perbaikan program ke depannya.

Sumber: Evaluasi dengan Tim Kerja Masyarakat

Setelah seluruh aspek intervensi dibahas bersama, praktikan kemudian mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Identifikasi ini dilakukan untuk melihat elemen apa saja yang membantu keberhasilan program serta hal-hal yang menjadi kendala di lapangan. Dengan memahami kedua aspek tersebut, praktikan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas intervensi dan apa yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan program di masa mendatang. Faktor pendukung yang ditemukan antara lain adanya partisipasi aktif dari target sasaran, dukungan

dari Tim Kerja Masyarakat, serta keterlibatan perangkat desa dan penyuluh pertanian. Selain itu, semangat kebersamaan dan komunikasi yang baik antar peserta turut memperlancar jalannya kegiatan. Sementara itu, faktor penghambat yang muncul meliputi keterbatasan waktu peserta, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Kendala tersebut menjadi bahan refleksi penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program selanjutnya. Berikut hasil faktor pendukung dan penghambat selama proses intervensi:

Tabel 4.6. Faktor Pendukung dan Penghambat kegiatan Intervensi

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Kehadiran dan partisipasi aktif target sasaran yang mengikuti kegiatan	Ketersediaan waktu beberapa target sasaran yang membuat tidak dapat mengikuti kegiatan
2.	Kehadiran penyuluh dari dinas Badan Penyuluh Pertanian, yang berpengalaman	Rendahnya tingkat pengetahuan awal target sasaran tentang teknik pertanian
3.	Minat yang tinggi dari target sasaran mengenai teknik penanaman media polybag	Curah hujan yang tidak menentu menjadi penghambat praktikan melakukan kegiatan praktik menanam sayuran
4.	Dukungan dari TKM yang memperlancar proses intervensi	
5.	Ketersediaan lahan atau pekarangan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk praktik	

Sumber: Evaluasi dengan Tim Kerja Masyarakat

4.5.2. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan oleh praktikan bersama Tim Kerja Masyarakat. Proses evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan program dapat tercapai, serta menilai dampak kegiatan terhadap peserta, baik dari peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun keterlibatan aktif selama pelaksanaan program. Selain itu, evaluasi juga menjadi bahan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan program sebagai dasar perbaikan ke depan. Adapun beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan oleh praktikan antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan Program Sitisari Perempuan Berkebun (SARIMBA)
2. Pembentukan Tim Kerja Masyarakat
3. Penyuluhan budidaya sayuran

4. Pelatihan budidaya sayuran
5. Praktik menanam sayuran di dalam polybag

Setelah dilaksanakan rangkaian kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan praktik langsung, terjadi peningkatan yang signifikan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi peserta. Peningkatan ini diukur melalui pengamatan langsung, diskusi evaluatif, serta kemampuan peserta dalam mempraktikkan kembali materi yang telah diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu memahami dan menerapkan teknik budidaya sayuran secara mandiri, sehingga tujuan program dalam meningkatkan kapasitas peserta dapat dikatakan tercapai.

Tabel 4.7. Evaluasi Program Intervensi

Aspek yang Dievaluasi	Kondisi pada Tahap <i>Discovery</i>	Kondisi pada Tahap <i>Development</i>	Indikator Keberhasilan
Pengetahuan tentang budidaya sayuran	Sebagian besar peserta belum memahami tahapan budidaya sayuran menggunakan polybag	Seluruh peserta memahami tahapan budidaya dari persemaian hingga perawatan	Peserta mampu menjelaskan kembali tahapan budidaya secara lisan
Teknik persemaian	Sebagian besar peserta belum memahami tahapan budidaya sayuran menggunakan polybag	Peserta mampu melakukan persemaian secara mandiri	100% peserta berhasil melakukan persemaian saat praktik
Penyiapan media tanam	Peserta belum mengetahui komposisi media tanam yang tepat	Peserta mampu menyiapkan media tanam sesuai arahan	Media tanam disiapkan dengan komposisi yang benar oleh peserta
Keterampilan penanaman	Penanaman dilakukan tanpa teknik yang tepat	Peserta mampu menanam bibit dengan teknik yang benar	Tanaman tumbuh dengan baik pasca penanaman
Partisipasi peserta	Partisipasi masih pasif	Partisipasi aktif dalam diskusi dan praktik	Kehadiran dan keterlibatan aktif peserta selama kegiatan
Pemanfaatan pekarangan	Pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal	Pekarangan mulai dimanfaatkan untuk menanam sayuran	Peserta menanam sayuran di rumah masing-masing

Sumber: Evaluasi dengan Tim Kerja Masyarakat

4.6. Tahap Terminasi dan Rujukan (Continuity)

4.6.1. Terminasi

Terminasi merupakan tahap pengakhiran intervensi dalam pekerjaan sosial, di mana hubungan antara praktikan dan masyarakat atau target sasaran diputus

secara formal sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Tahap persiapan terminasi sudah dilakukan oleh praktikan sejak tanggal 7 Desember 2025 dengan memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait bahwa kegiatan praktikum komunitas akan segera berakhir. Pemberitahuan ini dilakukan untuk memastikan proses terminasi berlangsung secara terencana dan tidak terkesan mendadak atau tiba-tiba bagi pihak yang terlibat.

Kegiatan terminasi secara formal dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Desember 2025, bertempat di kediaman Ibu Cicih. Acara ini menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dari Tim Kelompok Masyarakat (TKM) untuk secara resmi menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan praktikum telah selesai. Dalam kesempatan ini, praktikan juga memberikan ucapan terima kasih dan refleksi singkat mengenai proses intervensi, sambil menekankan pentingnya keberlanjutan hasil kegiatan yang telah dilakukan agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh masyarakat di masa mendatang.

4.6.2. Rujukan

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Program SARIMBA, praktikan melakukan rujukan kepada Tim Kerja Masyarakat (TKM) Desa Sitisari sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pendampingan dan pengelolaan kegiatan di tingkat komunitas. Rujukan ini bertujuan agar TKM dapat melanjutkan, memantau, serta mengembangkan kegiatan berkebun yang telah dilaksanakan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Melalui rujukan kepada TKM, diharapkan terdapat kesinambungan dalam pengelolaan kegiatan, baik dalam hal koordinasi, pembagian peran, maupun penguatan partisipasi warga. Praktikan juga mendorong TKM untuk menjadikan Program SARIMBA sebagai bagian dari kegiatan rutin masyarakat, sehingga kegiatan berkebun tidak hanya berhenti setelah program selesai, tetapi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal Desa Sitisari

BAB V

PRAKTIK BAIK PRAKTIKUM KOMUNITAS

5.1. Integrasi/Keterkaitan/ Saling Melengkapi Metode Community Work dan Group Work serta Capaian terbaik dari Praktikum Komunitas.

Metode *community work* dan *group work* memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi dalam proses pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang optimal. Setelah menjalani praktikum komunitas, praktikan menyadari bahwa kedua metode ini tidak dapat dipisahkan dalam praktik pekerjaan sosial di lapangan. *Community work* merupakan metode pekerjaan sosial yang menyoar kelompok sasaran yang lebih luas, mencakup masyarakat, organisasi, dan komunitas secara keseluruhan, dengan jumlah sasaran yang relatif besar serta bertujuan mendorong perubahan pada tingkat komunitas. Sementara itu, *group work* berfokus pada penanganan permasalahan sosial melalui media kelompok kecil dengan tujuan meningkatkan keberfungsian sosial anggotanya.

Pelaksanaan praktikum komunitas, penerapan metode *group work* dapat dilihat dari karakteristik sasaran yang berjumlah kurang dari sepuluh orang, namun memiliki kesamaan kebutuhan, kepentingan, dan tujuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa suatu kelompok kecil tetap dapat menjadi bagian dari komunitas apabila memiliki ciri-ciri kebersamaan yang kuat. Dengan demikian, batas antara *community work* dan *group work* menjadi saling terhubung dan fleksibel sesuai dengan konteks permasalahan dan sasaran yang dihadapi.

Praktikan memandang bahwa *community work* dan *group work* merupakan dua metode yang saling terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penanaman sayuran di polybag yang dilakukan dengan membentuk kelompok sebagai media pelaksanaan program SARIMBA. Kelompok tersebut menjadi wadah bagi para anggota untuk belajar bersama, berbagi pengetahuan, serta membangun kerja sama dan solidaritas dalam menjalankan kegiatan. Melalui dinamika kelompok, setiap anggota memperoleh kesempatan untuk saling mendukung dan berproses bersama dalam meningkatkan kapasitas masing-masing.

Dengan demikian, meskipun sasaran kegiatan berada pada tingkat komunitas, penerapan metode *group work* tetap memiliki peran penting dalam

mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Penggunaan kelompok sebagai media pelaksanaan program memungkinkan proses pemberdayaan berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana secara maksimal.

5.2. Refleksi Praktikan

5.2.1. Pengalaman Praktikum untuk pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerja Sosial

Selama pelaksanaan praktikum komunitas di Desa Sitisari, berbagai pengalaman yang diperoleh memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kapasitas diri dan profesionalisme praktikan sebagai calon pekerja sosial. Pada tahap membangun relasi melalui dialog dengan masyarakat, praktikan belajar bahwa komunikasi interpersonal yang terbuka, empatik, dan menghargai sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya. Proses ini membantu praktikan memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat, sekaligus melatih kepekaan dalam mendengarkan aspirasi warga, khususnya perempuan rawan sosial ekonomi, sebagai dasar dalam memahami kebutuhan yang sesungguhnya.

Pada tahap asesmen hingga evaluasi, praktikan memperoleh pembelajaran berharga dalam mengidentifikasi kebutuhan komunitas, menyusun perencanaan kegiatan yang kontekstual, serta merefleksikan pelaksanaan program secara kritis. Penerapan metode partisipatif, seperti pemetaan sosial dan diskusi kelompok, memperkuat kemampuan analisis dan pengambilan keputusan secara bersama. Melalui proses evaluasi, praktikan menyadari pentingnya menilai tidak hanya capaian kegiatan, tetapi juga proses pelaksanaannya sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan. Secara keseluruhan, praktikum komunitas ini menjadi pengalaman bermakna yang memperkuat kompetensi profesional, sikap reflektif, dan komitmen praktikan sebagai calon pekerja sosial yang peka terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat.

5.2.2. Dilema Etik yang Dihadapi dan solusinya

Dilema etik muncul ketika sebagian anggota komunitas menaruh harapan yang terlalu tinggi terhadap hasil kegiatan yang dilaksanakan. Di dalam situasi ini, praktikan menghadapi tantangan untuk mengelola ekspektasi masyarakat agar tetap berada pada batas yang realistis, tanpa mengurangi semangat dan

partisipasi mereka. Praktikan berupaya menjaga prinsip transparansi dan keadilan dengan menyampaikan informasi secara terbuka serta tidak menjanjikan hasil di luar kapasitas program.

Sebagai upaya penyelesaian, praktikan menerapkan komunikasi yang jujur dan persuasif mengenai tujuan, ruang lingkup, serta keterbatasan program yang dijalankan. Selain itu, praktikan juga menjalin kerja sama dengan pihak pendukung, seperti Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Darma, guna memperkuat pemahaman masyarakat serta memastikan program berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

5.3. Keterlibatan (Peran) Praktikan dalam Kegiatan di Lokasi Praktikum Komunitas.

Selama menjalani praktikum komunitas 40 hari praktikan mengikuti kegiatan diluar konteks praktikum, diantaranya:

1. Pengajian

Praktikan mengikuti kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap malam Jumat di lingkungan desa. Kegiatan ini menjadi sarana bagi praktikan untuk berbaur dengan masyarakat serta memahami nilai-nilai keagamaan yang berkembang dan dijunjung tinggi oleh warga setempat. Kehadiran praktikan dalam pengajian juga memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kedekatan dengan masyarakat.



Foto 5.1. Pengajian
Sumber: Dokumentasi praktikan

2. Senam bersama kader PKK

Praktikan berpartisipasi dalam kegiatan senam bersama kader PKK yang rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi. Melalui kegiatan ini, praktikan terlibat

langsung dalam aktivitas kebugaran masyarakat sekaligus menjalin komunikasi dan interaksi yang lebih akrab dengan para kader PKK. Kegiatan senam menjadi media informal untuk membangun kebersamaan dan mempererat hubungan sosial.



Foto 5.2. Senam bersama kader PKK
Sumber: Dokumentasi praktikan

3. Kegiatan Posyandu

Praktikan turut serta dalam kegiatan posyandu yang diselenggarakan secara rutin setiap satu bulan sekali dengan sasaran ibu hamil, balita, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia. Dalam kegiatan ini, praktikan membantu kelancaran pelaksanaan posyandu serta mengamati proses pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa. Keterlibatan ini memberikan pemahaman mengenai peran posyandu dalam mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh.



Foto 5.3. Posyandu
Sumber: Dokumentasi praktikan

4. Pelantikan Perangkat Desa

Praktikan menghadiri kegiatan pelantikan perangkat desa, yaitu kepala dusun, sebagai bagian dari partisipasi dalam agenda pemerintahan desa. Kegiatan ini memberikan wawasan kepada praktikan mengenai struktur

pemerintahan desa serta proses administrasi dan kepemimpinan di tingkat lokal. Kehadiran praktikan juga menjadi bentuk penghormatan terhadap kegiatan resmi desa. Selain itu, kegiatan ini membuka kesempatan bagi praktikan untuk mengenal lebih dekat para pemangku kepentingan desa. Interaksi yang terjalin turut mendukung proses membangun relasi kerja yang baik dengan perangkat desa. Pemahaman terhadap struktur dan peran aparat desa ini menjadi bekal penting dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan selanjutnya.



Foto 5.4. Pelantikan Perangkat Desa
Sumber: Dokumentasi praktikan

5. Senam bersama di kecamatan Darma

Praktikan mengikuti kegiatan senam bersama yang dilaksanakan setiap hari Jumat di tingkat Kecamatan Darma. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi, sehingga menjadi kesempatan bagi praktikan untuk memperluas jejaring sosial serta mengenal dinamika kegiatan masyarakat di tingkat kecamatan.



Foto 5.5. Senam bersama di kecamatan
Sumber: Dokumentasi praktikan

6. Family Gathering dengan kader PKK dan perangkat desa

Praktikan turut serta dalam kegiatan *family gathering* bersama kader PKK dan perangkat desa yang dilaksanakan pada hari Minggu, 30 November, di kawasan Pasir Batang. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, meningkatkan kebersamaan, serta memperkuat kerja sama antar unsur masyarakat dan pemerintah desa. Melalui kegiatan ini, praktikan merasakan suasana kebersamaan yang hangat dan penuh keakraban.



Foto 5.6. Family Gathering
Sumber: Dokumentasi praktikan

7. Pembuatan pupuk untuk penanaman melon

Praktikan terlibat secara aktif dalam kegiatan pembuatan pupuk yang digunakan untuk penanaman melon. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa perangkat desa dan perwakilan BUMDes. Keterlibatan praktikan dalam proses pembuatan pupuk memberikan pengalaman praktis terkait kegiatan pertanian serta menunjukkan adanya kolaborasi antara masyarakat, perangkat desa, dan BUMDes dalam mendukung pengembangan potensi pertanian desa.



Foto 5.7. Pembuatan pupuk
Sumber: Dokumentasi praktikan

5.4. Tantangan Praktikum Komunitas.

Praktikum Komunitas yang dilakukan di desa Sitisari Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan selama 40 hari kerja tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan. Tantangan-tantangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran praktikan karena memberikan pengalaman nyata dalam menghadapi kondisi lapangan yang kompleks. Berdasarkan hasil observasi, pengalaman langsung, serta keterlibatan praktikan, terdapat beberapa tantangan utama yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Praktikan selama menjalani praktikum komunitas mengalami keterbatasan dalam hal bahasa
2. target sasaran memiliki kegiatan lain sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh praktikan sehingga tidak seluruh target sasaran dapat mengikuti program

BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Simpulan (Temuan-temuan penting selama praktikum)

Program SARIMBA (Situsari Perempuan Berkebun) merupakan inisiatif pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Desa Situsari melalui rangkaian kegiatan penyuluhan, pelatihan, serta praktik penanaman sayuran menggunakan media polybag. Program ini dirancang berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi lokal, sehingga mampu mendorong partisipasi aktif peserta sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya sayuran yang dapat diterapkan secara mandiri di lingkungan rumah tangga. Secara umum, pelaksanaan program SARIMBA menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis kelompok memberikan dampak positif dalam menumbuhkan kebersamaan, rasa percaya diri, dan kemandirian peserta, serta memperkuat hubungan sosial melalui kerja sama dan solidaritas antar anggota kelompok.

Keberlanjutan program SARIMBA setelah mahasiswa menyelesaikan masa praktikum memiliki peluang yang cukup baik, mengingat adanya komitmen dari masyarakat dan dukungan pemerintah desa. Pembentukan dan keterlibatan Tim Kerja Masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan, terutama dalam pendampingan lanjutan dan koordinasi antar anggota kelompok. Selain itu, dukungan pemerintah desa melalui fasilitasi kegiatan dan sinergi dengan pihak terkait membuka peluang agar kegiatan budidaya sayuran ini dapat terus berjalan dan berkembang. Dengan adanya komitmen tersebut, program SARIMBA diharapkan tidak hanya berhenti sebagai kegiatan praktikum, tetapi dapat berlanjut sebagai upaya berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Situsari.

6.2. Rekomendasi (untuk pengembangan dan pemberdayaan organisasi dan masyarakat, implementasi kebijakan dan penyuluhan sosial)

Berdasarkan pelaksanaan Praktikum Komunitas yang berlangsung selama dua bulan di Desa Situsari, dapat disimpulkan bahwa desa ini memiliki berbagai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Potensi tersebut terlihat dari partisipasi masyarakat, dukungan perangkat desa, serta keberadaan berbagai

kegiatan sosial yang telah berjalan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan agar pelaksanaan program dan layanan yang ada dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Berdasarkan hasil observasi langsung, keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan, serta diskusi bersama pihak-pihak terkait di Desa Sitisari, praktikan menyusun sejumlah rekomendasi sebagai bentuk masukan konstruktif. Rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas, memperluas jangkauan manfaat program bagi masyarakat, serta menjadi dasar pertimbangan bagi pengembangan kegiatan yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.

1. Perlu adanya upaya perbaikan dan penguatan sistem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengingat perkembangan BUMDes Desa Sitisari masih tertinggal dibandingkan desa-desa lain di sekitarnya. Penguatan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat, termasuk hasil budidaya sayuran.
2. Perlunya pembaruan dan pengaktifan kembali website desa sebagai sarana informasi, transparansi, dan promosi potensi desa, karena website desa terlihat tidak aktif dalam waktu yang cukup lama.

Terkait dengan rencana exit strategy setelah mahasiswa menyelesaikan masa praktikum, keberlanjutan kegiatan budidaya sayuran diharapkan tetap berjalan melalui peran aktif Tim Kerja Masyarakat dan kelompok perempuan yang telah dibentuk. Mahasiswa melakukan alih peran dan penyerahan tanggung jawab kepada Tim Kerja Masyarakat sebagai pihak yang akan melanjutkan pendampingan dan koordinasi kegiatan. Berikut rekomendasi yang ditujukan kepada Tim Kerja Masyarakat (TKM) sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan penguatan program SARIMBA (Sitisari Perempuan Berkebun):

1. Tim Kerja Masyarakat diharapkan dapat melanjutkan kegiatan budidaya sayuran dengan melakukan pendampingan rutin kepada kelompok perempuan, baik melalui pertemuan berkala, monitoring perkembangan tanaman, maupun diskusi ringan terkait kendala yang dihadapi. Keberlanjutan pendampingan ini penting agar keterampilan yang telah diperoleh tidak berhenti dan terus berkembang.
2. TKM perlu memperjelas pembagian tugas antaranggota, seperti penanggung jawab kegiatan, pencatatan hasil, serta penghubung dengan pemerintah desa

atau pihak eksternal. Koordinasi yang baik akan membantu program berjalan lebih terarah dan memudahkan pengambilan keputusan bersama.

3. Tim Kerja Masyarakat diharapkan dapat memotivasi kelompok perempuan untuk semakin mandiri dalam mengelola kegiatan, mulai dari penyediaan sarana sederhana, perawatan tanaman, hingga pemanfaatan hasil panen. Dengan demikian, kelompok tidak bergantung pada pendamping eksternal dan mampu mengelola kegiatan secara berkelanjutan.
4. TKM disarankan untuk terus menjalin komunikasi dengan pemerintah desa, penyuluh pertanian, maupun BUMDes agar program budidaya sayuran dapat terintegrasi dengan program desa lainnya. Kerja sama ini dapat membuka peluang dukungan sarana, pelatihan lanjutan, serta pengembangan nilai ekonomi dari hasil budidaya.
5. Tim Kerja Masyarakat diharapkan dapat melakukan evaluasi sederhana secara berkala untuk menilai perkembangan kegiatan dan manfaat yang dirasakan oleh anggota. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program ke tahap selanjutnya, baik dari segi skala kegiatan maupun jenis tanaman yang dibudidayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2012). *Pengantar sosiologi: Konsep dan teori dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adi, I. R. (2008). *Intervensi komunitas: Pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afriansyaf, A., et al. (2023). *Pemberdayaan masyarakat*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Apriliandra, S., et al. (2014). *Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan hidup*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Laporan pembangunan nasional: Analisis kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Bauman, Z. (1990). *Modernity and ambivalence*. Cambridge: Polity Press.
- Cahaya, S. (2018). *Pengembangan masyarakat berbasis aset (ABCD)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Community Development Institute. (n.d.). *Stages in social work practice process: Dialogue, discovery, development*.
- Fahrudin, A. (2022). *Keterampilan mezzo dalam pekerjaan sosial*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial.
- Favourita, L., et al. (2014). *Modul praktik pekerjaan sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Febriyanti, R., et al. (2020). *Penyuluhan sosial: Membaca konteks dan memberdayakan masyarakat*. Bandung: Lekkas.
- Firsan, N. (2011). *Crisis public relations*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gamble, D. N., & Weil, M. (2010). *Community practice skills: Local to global perspectives*. New York: Columbia University Press.
- Gutiérrez, L. M., & Gant, L. M. (2016). *Community practice: Conceptual framework*. Michigan: University of Michigan Press.
- Hardcastle, D. A., Powers, P. R., & Wenocur, S. (2011). *Community practice: Theories and skills for social workers* (3rd ed.). New York: Oxford University Press.
- Hidayat, A., & Khoirudin, M. (2019). *Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi dalam perspektif kesejahteraan sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat, A., & Khoirudin, M. (2019). *Faktor penyebab dan dampak perempuan rawan sosial ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Homan, M. S. (2016). *Promoting community change: Making it happen in the real world* (6th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Isbandi, R. A. (2013). *Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maclver, R. M., & Page, C. H. (2011). *Society: An introductory analysis*. New York: Macmillan.
- Mardikanto, T., & Poerwoko, B. (2012). *Pemberdayaan masyarakat: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Andi.
- Melliny, C., Rintuh, A., & Atalay, M. (2022). Analisis kemiskinan dalam perspektif multidimensi. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 14(2), 115–130.
- Miley, K. K., O'Melia, M., & DuBois, B. (2014). *Generalist social work practice: An empowering approach*. Pearson Education.

- Netting, F. E., Kettner, P. M., McMurtry, S. L., & Thomas, M. L. (2017). *Social work macro practice* (6th ed.). Boston: Pearson.
- Pradila, Y., et al. (2022). *Analisis faktor penyebab perempuan rawan sosial ekonomi*. Jakarta: Pustaka Humaniora.
- Rintuh, A. (2003). *Kondisi sosial ekonomi dan dimensi kemiskinan*. Jakarta: Pustaka Litera.
- Rothman, J. (2008). Multi modes of intervention at the macro level. In J. Rothman, J. L. Erlich, & J. E. Tropman (Eds.), *Strategies of community intervention* (7th ed., pp. 19–44). Belmont, CA: Wadsworth.
- Rothman, J., Erlich, J. L., & Tropman, J. E. (2001). *Strategies of community intervention* (6th ed.). Itasca, IL: F. E. Peacock.
- Soedijanto. (2001). *Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Solikatun, S., Supono, & Masruroh, Y. (2014). Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 9(1), 45–58.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat* (Cet. ke-5). Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, E. (2020). *Pekerjaan sosial di dunia pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco, D. H. (2021). *Pekerjaan sosial dan proses pertolongan*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Suryawati, S. (2004). *Kemiskinan di Indonesia: Konsep, teori, dan analisis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- World Bank. (2017). *Poverty and shared prosperity: Piecing together the poverty puzzle*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2022). *Global poverty update*. Washington, DC: World Bank Group.
- World Bank Institute. (2000). *Capacity for development: People, institutions, and societies*. Washington, DC: World Bank.

Sumber lainnya




Pedoman Praktikum Komunitas 2025 Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita acara Lokakarya 1

	<p>POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Fax.: (022) 250 4838, 2501330 Email: humas@poltekkesos.ac.id</p>	
<p>BERITA ACARA PELAKSANAAN LOKAKARYA</p>		
<p>Pada hari Senin, 17 November 2025 pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan Lokakarya/<i>Community Meeting</i> tahap I pada kegiatan Praktikum Komunitas Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, bertempat di Balai Desa Sitisari Kabupaten Kuningan.</p> <p>Jumlah peserta yang hadir ..30..... Orang</p> <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.</p>		
<p>Kepala Desa Sitisari</p>  <p><u>Endin</u></p>	<p>Ketua Kelompok</p>  <p><u>M. Hari Nugraha</u> NRP. 2204057</p>	

Lampiran 2 Berita acara lokakarya 2



	<p>POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Fax.: (022) 250 4838, 2501330 Email: humas@politeknik-sosial.ac.id</p>	
---	---	---

BERITA ACARA PELAKSANAAN LOKAKARYA

Pada hari Jumat, 28 November 2025 pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan Lokakarya/*Community Meeting* tahap II pada kegiatan Praktikum Komunitas Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, bertempat di Balai Desa Sitasari Kabupaten Kuningan.

Jumlah peserta yang hadir¹⁰..... Orang

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

<p>Kepala Desa Sitasari</p>  <u>Endin</u>	<p>Ketua Kelompok</p>  <u>M. Hari Nugraha</u> NRP. 2204057
--	---

Lampiran 4 Absensi minggu pertama

**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**

Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

Minggu Ke: 1 (Satu)

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triananda Santi Aulia Putri	H	H	H	H	H	H		
2	2204127	Hanaa Alifah Isnaini	H	H	H	H	H	H		
3	2204138	Ditami Mega Prilani	H	H	H	H	H	H		
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia	H	H	H	H	H	H	1	
5	2204107	Edward Manulang	H	H	H	H	H	H		
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah	H	H	H	H	H	H		
7	2204057	M Hari Nugraha	H	H	H	H	H	H		
8	2204072	Gafrena Istyawanda	H	H	H	H	H	H		
9	2204148	Onhisya Maharani	H	H	H	H	H	H		
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama	H	H	H	H	H	H		

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Drs. Ramli, M.Pd
NIP. 19611016198810 1 001

Pembimbing Pendamping,

Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos
NIP. 198608042018022001

Pendamping Lapangan,

Edison, S.Pd
NIPD. 0817 19820904 2020 1 01

Ketua Kelompok,

M Hari Nugraha
NRP.2204057

Lampiran 5 Absensi minggu kedua

**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**

Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

Minggu Ke: 2 (Kedua)

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triananda Santi Aulia Putri	H	H	H	H	H	H		
2	2204127	Hanaa Alifah Isnaini	H	H	H	H	H	H		
3	2204138	Ditami Mega Prilani	H	H	H	H	H	H		
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia	H	H	H	H	H	H		
5	2204107	Edward Manulang	H	H	H	H	H	H		
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah	H	H	H	H	H	H		
7	2204057	M Hari Nugraha	H	H	H	H	H	H		
8	2204072	Gafrena Istyawanda	H	H	H	H	H	H		
9	2204148	Onhisya Maharani	H	H	H	H	H	H		
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama	H	H	H	H	H	H		

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Drs. Ramli, M.Pd
NIP. 19611016198810 1 001

Pembimbing Pendamping,

Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos
NIP. 198608042018022001

Pendamping Lapangan,

Edison, S.Pd
NIPD. 0817 19820904 2020 1 01

Ketua Kelompok,

M Hari Nugraha
NRP.2204057

Lampiran 6 Absensi minggu ketiga

**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**


Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

Minggu Ke: 3 (Ketiga)

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triananda Santi Aulia Putri	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
2	2204127	Hanaa Alifah Isnaini	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
3	2204138	Ditami Mega Prilani	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
5	2204107	Edward Manulang	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
7	2204057	M Hari Nugraha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
8	2204072	Gafrena Istyawanda	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
9	2204148	Onhisya Maharani	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	

Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Drs. Ramli, M.Pd
NIP. 19611016198810 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos
NIP. 198608042018022001

Pendamping Lapangan,



Edison, S.Pd
NIPD. 0817 19820904 2020 1 01

Ketua Kelompok,



M Hari Nugraha
NRP.2204057

Lampiran 7 Absensi minggu keempat

**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**

Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

Minggu Ke: 4 (Keempat)

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triananda Santi Aulia Putri	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
2	2204127	Hanaa Alifah Isnaini	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
3	2204138	Ditami Mega Prilani	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
5	2204107	Edward Manulang	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
7	2204057	M Hari Nugraha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
8	2204072	Gafrena Istyawanda	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
9	2204148	Onhisya Maharani	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	

Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Drs. Ramli, M.Pd
NIP. 19611016198810 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos
NIP. 198608042018022001

Pendamping Lapangan,



Edison, S.Pd
NIPD. 0817 19820904 2020 1 01

Ketua Kelompok,



M Hari Nugraha
NRP.2204057

Lampiran 8 Absensi minggu kelima

**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**

Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

Minggu Ke: 5 (Lima)

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triananda Santi Aulia Putri	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
2	2204127	Hanaa Alifab Isnaini	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
3	2204138	Ditami Mega Prilani	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
5	2204107	Edward Manulang	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
7	2204057	M Hari Nugraha	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
8	2204072	Gafrena Istyawanda	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
9	2204148	Onhisya Maharani	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	

Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Drs. Ramli, M.Pd
NIP. 19611016198810 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos
NIP. 198608042018022001

Pendamping Lapangan,



Edison, S.Pd
NIPD. 0817 19820904 2020 1 01

Ketua Kelompok,



M Hari Nugraha
NRP.2204057

Lampiran 9 Absensi minggu keenam

**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**

Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

Minggu Ke: 6 (enam)

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triananda Santi Aulia Putri	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
2	2204127	Hanaa Alifab Isnaini	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
3	2204138	Ditami Mega Prilani	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
5	2204107	Edward Manulang	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
7	2204057	M Hari Nugraha	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
8	2204072	Gafrena Istyawanda	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
9	2204148	Onhisya Maharani	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	Had.	

Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Drs. Ramli, M.Pd
NIP. 19611016198810 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos
NIP. 198608042018022001

Pendamping Lapangan,



Edison, S.Pd
NIPD. 0817 19820904 2020 1 01

Ketua Kelompok,



M Hari Nugraha
NRP.2204057

Lampiran 10 Absensi minggu ketujuh

LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025

Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

Minggu Ke: 7 (Tujuh)

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triananda Santi Aulia Putri	Ah	Ah						
2	2204127	Hanaa Alifah Isnaini	Ah	Ah						
3	2204138	Ditami Mega Prilani	Ah	Ah						
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia	Ah	Ah						
5	2204107	Edward Manulang	Ah	Ah						
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah	Ah	Ah						
7	2204057	M Hari Nugraha	Ah	Ah						
8	2204072	Gafrena Istyawanda	Ah	Ah						
9	2204148	Onhisya Maharani	Ah	Ah						
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama	Ah	Ah						

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Pendamping Lapangan,

Ketua Kelompok,


Drs. Ramli, M.Pd
NIP. 19611016198810 1 001

Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos
NIP. 198608042018022001

Edison, S.Pd
NIPD. 0817 19820904 2020 1 01

M Hari Nugraha
NRP.2204057

Lampiran 11 SK SARIMBA



KEPUTUSAN KEPALA DESA SITUSARI
NOMOR 28/KEPDes/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SITUSARI PEREMPUAN BERKEKIL (SARIMBA) DESA
SITUSARI

KEPALA DESA SITUSARI

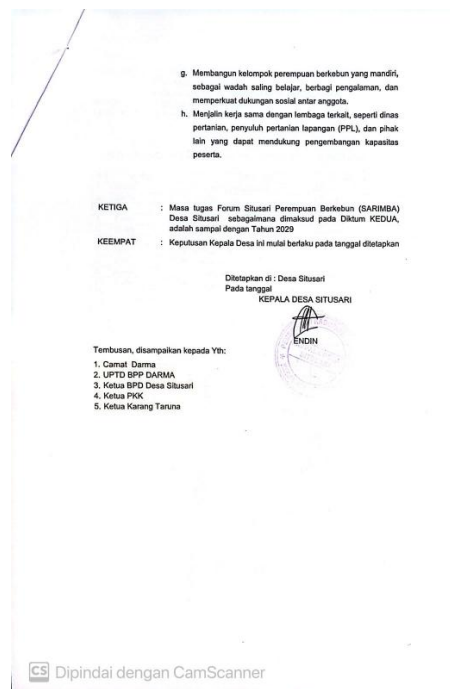
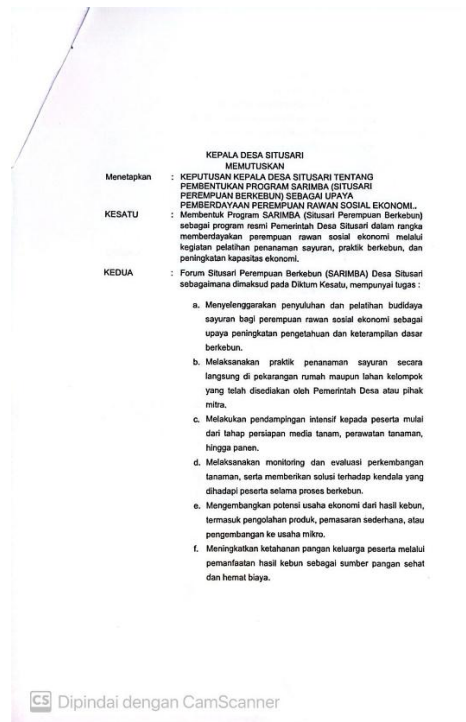
Menimbang :

- a. bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRISE) merupakan kelompok rentan yang memerlukan pembangunan, peningkatan kapasitas, serta dukungan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nya;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi tersebut diperlukan suatu program pembangunan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan bagi perempuan rawan sosial ekonomi melalui kegiatan pelatihan, praktik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Situsari tentang Pembentukan Program SARIMBA (Situari Perempuan Berkebutuh) sebagai upaya pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi di Desa Situsari.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menetapkan perempuan miskin sebagai kelompok rentan yang berhak mendapatkan pembangunan sosial;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menganjurkan desa untuk mengembangkan pembangunan masyarakat dan melindungi kelompok rentan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menitikberatkan urusan sosial termasuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRISE), yang menegaskan hak PRISE untuk mendapatkan peningkatan kapasitas, pelatihan, serta pemberdayaan ekonomi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mengaitkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat di desa;

CS Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SITUSARI
 KECAMATAN DARMA
 KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 32/KEPDes TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 November 2025

TENTANG
 FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA TANGGUH BENCANA

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT
1.	Endin	L	Penanggungjawab	Situsari
2.	Cicih	P	Ketua	Situsari
3.	Nisa	P	Sekretaris	Situsari
4.	Eem	P	Bendahara	Situsari
5.	Odah	P	Anggota	Situsari
6.	Riama	P	Anggota	Situsari
7.	Icih	P	Anggota	Situsari
8.	Elih	P	Anggota	Situsari
9.	Nesa	P	Anggota	Situsari
10.	Enih	P	Anggota	Situsari
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

KEPALA DESA SITUSARI



Struktur FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA TANGGUH BENCANA

